

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kultur perusahaan sebelum tahun 90-an didominasi oleh cara berpikir dan perilaku ekonomi yang bersifat mencari keuntungan semata (*profit-oriented*). Entitas bisnis hanya mementingkan kepentingan *stakeholders* internal tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang juga termasuk dalam *stakeholders*, sehingga terjadi hubungan yang kurang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Beberapa perusahaan mendapatkan kritik keras karena telah menciptakan masalah sosial dan lingkungan, seperti polusi, penyusutan sumber daya alam, limbah dan keamanan produk yang tidak terjamin, hak dan status karyawan, keselamatan kerja dan lain-lain. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* perusahaan menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Post et.al, 2002 dalam Solihin, 2009;52). Menurut *The World Best Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen untuk memberikan kontribusi bagi

pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun pembangunan.

Untuk melaksanakan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga tingkat kepercayaan konsumen makin tinggi. Seiring meningkatnya kepercayaan konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat (Sutopoyudo, 2009).

Perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik pengungkapan CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 74 yang berisi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang – Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam Tanggung Jawab Sosial perusahaan. Namun terkadang ada yang menganggap bahwa suatu perusahaan melaksanakan CSR bukan karena kesadaran namun lebih karena keterpaksaan terhadap Undang-Undang tersebut.

Praktik pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan berinteraksi dengan masyarakat dan aktifitas perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian praktik pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. (Ghozali dan Chairi, 2007:13).

Hal ini tentu akan terwujud apabila setiap perusahaan mempunyai tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Monks (2003) dikutip dalam Kaihatu (2006:2) mekanisme *Good Corporate Governance* akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Perusahaan harus memperhatikan hal tersebut karena dalam proses operasionalnya perusahaan tidak hidup sendiri,

melainkan bersama lingkungan sekitar. Oleh karena itu perusahaan harus menjaga lingkungannya agar secara timbal balik, baik perusahaan maupun masyarakat tidak ada yang dirugikan. Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang dapat memberikan arahan dan kendali agar perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas Tanggung Jawab Sosialnya.

Pelaksanaan GCG harus didukung dengan organ perusahaan yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Organ perusahaan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya *Good Corporate Governance* seperti sekretaris perusahaan, komite audit, dan komite-komite lain yang membantu pelaksanaan GCG.

Implementasi GCG di Indonesia masih tergolong lemah, hal ini terbukti dengan adanya kasus Kimia Farma pada tahun 2001 yang terjadi akibat adanya manipulasi laporan keuangan (BAPEPAM-LK, 2002). PT. Kimia Farma adalah sebuah BUMN yang sahamnya telah diperdagangkan di bursa sehingga menjadi perusahaan publik. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan BAPEPAM-LK, ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji

(*overstatement*) laba bersih yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp. 32.700.000.000,00 yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24% dari laba bersih. Salah saji ini terjadi dengan cara melebihiajikan penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha, dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh direktur produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit produksi PT Kimia Farma (BAPEPAM-LK, 2002). Kasus tersebut menjadi alasan kuat bagi para pelaku dunia usaha untuk lebih memperhatikan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa aktivitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan GCG. Beberapa penelitian yang menguji hubungan dan pengaruh antara kedua hal tersebut masih belum menunjukkan kekonsistenan dari hasil yang di dapat. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2011) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat dewan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2009) dan Wulan (2011) yang menemukan bahwa independensi dewan komisaris, kepemilikan saham asing dan *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

Berdasar pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan, penelitian kali ini bermaksud untuk menguji kembali kekonsistenan karakteristik *Good Corporate Governance* terhadap luas pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility, dengan menggunakan beberapa variabel yang diambil dari penelitian – penelitian sebelumnya dan menambahkan variabel-variabel lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan populasi dan sampel perusahaan manufaktur.

Perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang cukup besar dalam masalah-masalah seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Ini disebabkan karena perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat. Dilihat dari produksinya perusahaan manufaktur mau tidak mau akan menghasilkan limbah produksi dan hal ini berhubungan erat dengan masalah pencemaran lingkungan.

Proses produksi yang dilakukan perusahaan manufaktur juga mengharuskan mereka memiliki tenaga kerja bagian produksi dan hal ini berkaitan erat dengan masalah keselamatan tenaga kerja. Selain itu perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk kepada konsumen, sehingga isu keselamatan dan keamanan produk menjadi penting untuk diungkapkan kepada masyarakat. Hal-hal inilah yang membedakan perusahaan manufaktur dengan perusahaan lainnya serta menjadi alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian tentang pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dengan ini penulis berusaha untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap**

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011“

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* bukan karena kesadaran namun lebih karena keterpaksaan karena adanya peraturan Undang-Undang.
2. Dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya yang pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan turun.
3. Perusahaan belum menyadari manfaat penerapan *Good Corporate Governance*.
4. Perusahaan belum menyadari manfaat dari implementasi *Corporate Social Responsibility*.

C. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya masalah dan keterbatasan waktu, penelitian ini menitikberatkan pada masalah yang diduga memiliki pengaruh penting terhadap *Corporate Social Responsibility* yaitu *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan

sebagai variabel kontrol pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011?
2. Bagaimana pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011?
3. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011?
4. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011?
5. Bagaimana pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011?
6. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) sebagai variabel kontrol terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011?

7. Bagaimana pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011.
2. Mengetahui pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011.
3. Mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011.
4. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011.
5. Mengetahui pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011.

6. Mengetahui Ukuran Perusahaan (Size) sebagai variabel kontrol terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011
7. Mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Perusahaan / Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan stimulus sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Corporate Social Responsibility*

a. Pengertian dan Konsep CSR

Konsep CSR merupakan konsep yang sulit diartikan. Hal inilah yang membuat definisi CSR sangatlah luas dan bervariasi. Pengertian CSR menurut Johnson dan John, dalam Nor Hadi (2011:46) menyatakan bahwa : “ *CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society*“ . Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sebuah definisi yang lebih luas oleh *World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD)* yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*) menyatakan bahwa “CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat

ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya”.

CSR berusaha memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Darwin (2004) dalam Waryanto (2011:19), pertanggung jawaban sosial adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang melebihi tanggung jawabnya di bidang hukum. Dengan demikian, operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai CSR pada intinya adalah merupakan suatu upaya tanggung jawab perusahaan atau organisasi atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan aktivitas yang telah diambil dan dilakukan oleh organisasi tersebut, di mana dampak itu pastinya akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dan lingkungan.

b. Landasan Teoritis *Corporate Social Responsibility*

1) Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan

perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memosisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi. 2011:87). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan suatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*) (O'Donovan, dalam Nor Hadi. 2011:87).

Lindblom (1994) dalam Achmad (2007:9) menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi yang terdiri dari:

- a) Mencoba untuk mendidik *stakeholdernya* tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- b) Mencoba untuk merubah persepsi *stakeholder* terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
- c) Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah yang menjadi perhatian (mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan - kegagalan).
- d) Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya.

Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang penting terhadap praktik pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan oleh Lindblom (Achmad, 2007:10). Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan umum bagi pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif.

2) Teori Kontrak Sosial

Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar bisa terjadi keselarasan, dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana antara keduanya saling mempengaruhi. Untuk itu agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial yang baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing (Nor Hadi. 2011:96).

Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Disini perusahaan mempunyai kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang *legitimate*. (Deegan, dalam Nor Hadi. 2011:96).

Shocker dan Sethi dalam Nor Hadi (2011:98) menjelaskan konsep kontrak sosial (*social contract*) bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial didasarkan pada :

- a) Hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
- b) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik kepada kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.

Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak adanya *power* institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan legitimasi. Perusahaan harus melebarkan tanggung jawabnya tidak hanya sekedar *economic responsibility* yang lebih diarahkan kepada *shareholder* (pemilik perusahaan), namun perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar dan bertanggung jawab kepada pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*legal responsibility*). Di samping itu, perusahaan juga

tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab kepada masyarakat, yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang timbul (*societal respobsibility*) (Nor Hadi 2011:98).

c. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial atau sering disebut sebagai *Corporate Social Reporting* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray et. al.,1987 dalam Waryanto,2011:1). Kontribusi negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, oleh karena itu dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jadi agar bentuk Tanggung Jawab Sosial yang telah dilakukan perusahaan dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Hal serupa disampaikan oleh Darwin (2007) dikutip dalam Waryanto (2011:20) bahwa pengungkapan Tanggung Jawab Sosial bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan *public* dan *stakeholders* lainnya tentang

bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial (CSR) dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Laporan tahunan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengungkapan dan pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat. Para pengguna laporan tahunan seperti analis, investor, masyarakat dan lainnya membutuhkan informasi yang lengkap mengenai laporan tentang suatu perusahaan, sehingga pengungkapan yang lebih rinci mengenai perusahaan akan sangat penting dan bermanfaat untuk melakukan penilaian dan analisis pengambilan keputusan yang akan mereka lakukan.

Dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri. Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam Waryanto (2011:21) menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktik dan pengungkapan CSR, karena memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya

operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analisis keuangan.

Menurut Taridi (2009) ada beberapa manfaat dari praktik dan pengungkapan CSR bagi perusahaan, antara lain :

- 1) Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan bertanggung jawab, yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara *sustainable*.
- 2) Perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*) sehingga meningkatkan nilai perusahaan (*value of the firm*).
- 3) Peningkatan keyakinan investor terhadap korporasi sehingga menjadi lebih atraktif sebagai investasi.
- 4) Memudahkan akses terhadap investasi *domestic* dan asing.
- 5) Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntutan hukum.

Secara yuridis formal, pemerintah telah mendukung praktik dan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial melalui Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2 dan Bab V pasal 74. Pada pasal 66 ayat 2 bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan

CSR juga diatur dalam Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 Pasal 15 b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam Tanggung Jawab Sosial perusahaan.

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI_KAM) atau standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan *Indonesia Sustainability Report Awards* (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam laporan berkelanjutan atau *sustainability report*. Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan *sustainability reporting*.

Indikator kinerja dalam Standar GRI dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang mencakup hak azasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk, dan masyarakat (GRI, 2006). Total indikator kinerja mencapai 79 indikator, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktik tenaga kerja, 9 indikator hak asasi manusia, 8 indikator kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk.

Jadi dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR, item-item yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan dalam GRI *guidelines*, minimal yang harus ada antara lain (GRI, 2006) :

- 1) Indikator kinerja ekonomi, meliputi aspek kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung.
- 2) Indikator kinerja lingkungan hidup, meliputi aspek material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, dan limbah; produk dan jasa, aspek kesesuaian, transportasi, dan aspek secara keseluruhan.
- 3) Indikator kinerja praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, meliputi aspek ketenagakerjaan, hubungan tenaga kerja/manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta aspek keanekaragaman dan kesempatan yang sama.
- 4) Indikator kinerja hak azasi manusia, meliputi aspek praktik investasi dan pengadaan, aspek non-diskriminasi, kebebasan berserikat, daya tawar kelompok, tenaga kerja anak, pegawai tetap dan kontrak, praktik keselamatan serta hak masyarakat (adat).
- 5) Indikator kinerja masyarakat, meliputi aspek kemasyarakatan, kebijakan mengenai korupsi, kebijakan umum/*public*, perilaku anti persaingan, dan aspek kesesuaian.

- 6) Indikator kinerja tanggung jawab produk, yang meliputi aspek keselamatan dan kesehatan konsumen, labeling produk dan jasa, komunikasi pemasaran, privasi konsumen dan aspek kesesuaian.

d. Cara Mengukur *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility dapat dihitung dengan melihat tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan yang dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index (CSRI)* yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI meliputi 79 item pengungkapan yang meliputi: *economic (EC)*, *environment (EN)*, *humanrights (HR)*, *labor practices (LP)*, *product responsibility (PR)*, dan *society (SO)*. Perhitungan Indeks Luas Pengungkapan CSR (CSRDI) dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRDI = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{79}$$

(GRI,2006)

2. *Good Corporate Governance*

a. Konsep dan Pengertian *Good Corporate Governance*

Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentang *Good Corporate Governance*. Namun demikian pada umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama. *Good Corporate Governance* atau GCG berasal dari istilah "*Corporate Governance*" yang berarti tata kelola perusahaan, merupakan suatu bentuk analogi antara pemerintahan suatu negara dengan pemerintahan

dalam suatu perusahaan (Becht et al., 2002 dalam Waryanto, 2011). Sebagaimana dalam pemerintahan suatu negara, dalam perusahaan juga terdapat berbagai kelompok dengan berbagai tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu muncul sebuah konsep *corporate governance* dalam mengatasi konflik kepentingan tersebut agar perusahaan dapat dikelola dengan baik.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), secara umum istilah *good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah diterima oleh orang awam sekalipun, yaitu: “komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika” (BPKP, 2003).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu: "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur

dan mengendalikan perusahaan” (FCGI 2009). Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah "untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)” (FCGI, 2009).

Pengertian dan konsep *corporate governance* ini dilandasi dengan Teori Agensi (*agency theory*) dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Waryanto, 2011:26). Dengan adanya mekanisme *Corporate Governance* ini, maka tindakan kecurangan yang dilakukan agen dapat diminimalisasi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti yang telah ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) berikut ini:

1) *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2) *Disclosure/ Transparency* (Keterbukaan/ Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

3) *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus

dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

4) *Responsibility* (Responsibilitas)

Responsibility (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya Tanggung Jawab Sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

5) *Independency* (Independen)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat

dan proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

Untuk mewujudkan terciptanya *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan, dengan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak baik dalam maupun luar perusahaan (Waryanto, 2011:27). RUPS atau pemegang saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan merupakan organ-organ perusahaan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

b. Peranan *Good Corporate Governance* (Teori Agensi)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan orang lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Di dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham/pemilik, sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola harta pemilik. *Principal* menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. *Agent* sebagai pengelola berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana dipercayakan pemegang saham (*principal*),

Eisenthart (1989) dalam Aini (2010:11) menyatakan bahwa teori agensi dilandasi oleh tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self*

interest). Kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*). dan ketiga, manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Atas dasar tiga asumsi tersebut, manajer sebagai seorang manusia kemungkinan besar mempunyai kecenderungan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya (*opportunistic*).

Adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena kemungkinan *agent* tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Sesuai dengan *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson dalam Waryanto (2011) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agent* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Selain itu, konflik timbul juga dikarenakan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. *Agent* akan memiliki lebih banyak informasi mengenai kinerja dan keadaan perusahaan secara menyeluruh. Sedangkan *principal* justru sebaliknya. Hal tersebut yang biasa disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi antara *agent* dengan *principal* dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba. Manajer akan berusaha melakukan hal

tersebut untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan pemilik atau pemegang saham.

Terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan yang dikeluarkan ditujukan untuk tiga jenis pengeluaran yaitu :

- a. Biaya monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh *agent*.
- b. Biaya bonding (*bonding cost*), merupakan biaya untuk menjamin bahwa *agent* tidak akan bertindak merugikan *principal*, atau dengan kata lain untuk meyakinkan *agent*, bahwa *principal* akan memberikan kompensasi jika benar-benar melakukan tindakan tersebut.
- c. Biaya kerugian residual (*residual lost*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh *principal* akibat dari perbedaan kepentingan.

Corporate Governance dapat membantu mengurangi biaya agensi yang mungkin terjadi. Biaya agensi yang muncul karena konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Aini, 2011:12). Mekanisme yang dimaksud adalah mekanisme *Good Corporate Governance*

(GCG). GCG dianggap mampu mengurangi masalah keagenan karena adanya pengawasan maka perilaku *opportunist* manajer dan kecenderungan untuk menyembunyikan informasi demi keuntungan pribadi dan dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan perusahaan.

c. Dewan Komisaris

Terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu :

1) Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*.

Sistem satu tingkat berasal dari sistem hukum *Anglo Saxon*. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif). Negara-negara yang menggunakan *One Tier System* misalnya adalah Amerika Serikat dan Inggris.

Gambar 1. Struktur Board of Director dalam *One Tier System*

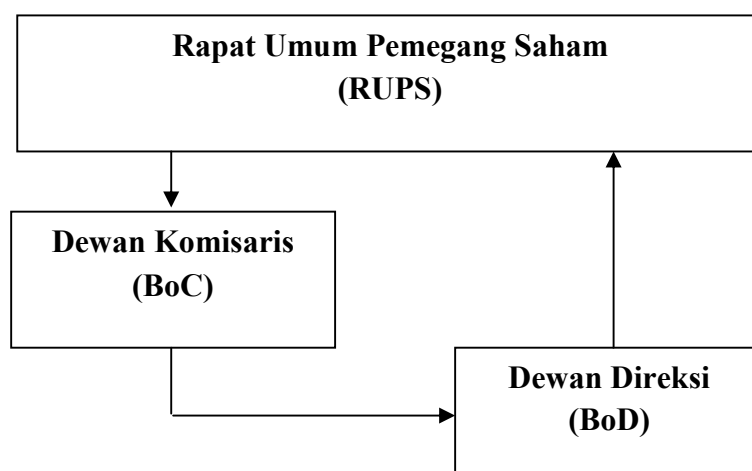


Sumber : FCGI (2009)

2) Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*.

Sistem dua tingkat berasal dari sistem hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Direksi juga harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga Dewan Komisaris terutama bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menggunakan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang termasuk juga Indonesia.

Gambar 2. Struktur BoD dan BoC dalam *Two Tiers System* yang berkembang di Indonesia



Sumber : FCGI (2009)

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG sesuai dengan aturan. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (KNKG, 2006). Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

- a) Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b) Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Menurut Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97, dijelaskan bahwa Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan

nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut Pasal 98 UUPM menegaskan, bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.

Menurut Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pada Pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006).

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 (FCGI, 2009). Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang

dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut :

- a) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- b) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat bersangkutan;
- c) Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat bersangkutan;
- d) Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- e) Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

d. Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang dapat membantu melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah Komite Audit, yang memiliki tugas

terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2009). Pada umumnya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu :

- 1) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*), adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana komitmen jangka panjang;
- 2) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
- 3) Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*), tanggung jawab Komite Audit untuk Pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Dalam Pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2006) dijelaskan bahwa, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik; pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Selain itu, menurut KNKG (2006) jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau bidang keuangan.

Komite Audit terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi

pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang obyektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2009). Komite Audit akan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dengan demikian, apabila fungsi dan tanggung jawab Komite Audit dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip GCG yang akan mendorong perusahaan untuk selalu bertanggung jawab kepada kepentingan seluruh *stakeholders*.

e. Perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Terdapat beberapa alasan yang mendorong munculnya GCG sehingga menarik perhatian dunia dan mendorong desakan untuk mengimplementasikan GCG (Becht et.al., 2002 dalam Waryanto, 2011:35) antara lain : munculnya gelombang privatisasi di seluruh dunia; terjadinya reformasi dana pensiun; adanya merger/pengambilalihan perusahaan; adanya deregulasi dan integrasi pasar modal; krisis ekonomi Asia Timur, Rusia, dan Brasil; berbagai skandal yang menimpa perusahaan besar.

Perkembangan GCG di Indonesia terpengaruh oleh kejadian-kejadian tersebut di atas, karena Indonesia merupakan bagian dari perekonomian dunia. Krisis ekonomi di Asia Timur merupakan faktor

utama terjadinya krisis di Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) dalam Kaihatu (2006:4) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris, ketiga; inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang baik. Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan dari sektor swasta turut berpartisipasi bersama pemerintah dan lembaga-lembaga independen berhasil membentuk suatu sistem untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik agar Indonesia terbebas dari krisis (Kaihatu, 2006:5). Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan keputusan Menko Ekuin Nomor : KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Saat ini KNKCG telah diganti dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKKG) melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004.

Selain itu penerapan GCG didukung juga oleh sektor swasta melalui mekanisme pasar modal seperti PT. BEI dan BAPEPAM-LK mengeluarkan regulasi-regulasi guna mendukung implementasi GCG di Indonesia (Taridi, 2009) dalam (Waryanto, 2011:36)

- 1) Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memberlakukan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan.
- 2) Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-63/PM/1996 yang kemudian dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.I.4 tentang pembentukan sekretaris perusahaan.
- 3) Surat Edaran Ketua BAPEPAM-LK Nomor SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten.
- 4) Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-40/PM/2003 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor VII.G.11 tentang Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.

- 5) Surat Edaran Ketua BAPEPAM-LK Nomor SE-07/PM/2004 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit.
- 6) Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-45/PM/2004 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris pada emiten dan perusahaan publik.
- 7) Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-134/BL/2006 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian Laporan Tahunan bagi emiten dan perusahaan publik.

Selain dengan peraturan tersebut, implementasi GCG di Indonesia didukung dengan munculnya organisasi-organisasi independen pendukung seperti *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*. Dengan adanya lembaga-lembaga independen tersebut, maka implementasi GCG di Indonesia diharapkan semakin berkembang diikuti dengan kesadaran karena manfaat yang diperoleh oleh perusahaan.

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini

ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Christiawan dan Tarigan, 2007:2).

Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa ada kemungkinan permasalahan yang akan timbul di antara *principal* dan *agent* atau antara pemegang saham dan manajer. Masalah tersebut dapat disebabkan karena kecilnya kepemilikan oleh *agent* di perusahaan (Said, et al 2009 dalam Aini, 2011:30), hal ini dapat menjadi penyebab tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer, dimana manajer bertindak hanya untuk mementingkan dan menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, manajer tidak mengelola perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan *principal*.

Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan. Dengan demikian, manajemen tidak akan bertindak secara sepihak yang akan merugikan perusahaan sehingga akan mengurangi pengawasan dan *agency cost*.

4. Kepemilikan Institusional

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan Institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase (Lisyani, 2003:31). Kepemilikan Institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh Kepemilikan Institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Tingkat kepemilikan yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Investor Institusional memiliki *power* dan *experience* untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *Corporate Governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut

perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan (Aini, 2011:32). Hal ini berarti, dengan Kepemilikan Institusional yang besar dapat mendorong meningkatkan luas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Kepemilikan Institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

5. Kepemilikan Asing

Kepemilikan Asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik secara individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas.

Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain; pertama, perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih lama mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR. Kedua adalah perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Ketiga, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum (Waryanto, 2011:55).

6. Ukuran Perusahaan

Size perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001) dalam Jayanti (2011:30). Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat.

Teori legitimasi memiliki alasan tentang hubungan Ukuran Perusahaan dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki lebih banyak pemegang saham yang punya perhatian terhadap program sosial yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan merupakan alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini (Cowen *et. Al.*, 1987) dalam Achmad (2007:11).

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Ahmad (2009) mengenai “*Good Corporate Governance* dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan dewan komisaris independen dan profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ahmad terletak pada variabel independen yang akan diteliti, dalam penelitian ini menambahkan Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Perbedaan lain terletak pada populasi yang akan diteliti, penelitian yang dilakukan Ahmad meneliti pengungkapan CSR pada semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian ini hanya akan menggunakan perusahaan berkategori manufaktur.

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Yunita dan Andri (2011) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial di Dalam *Sustainability Report*”. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Andri (2011) terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Andri menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit. Sedangkan pada penelitian ini variabel proporsi dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit tidak digunakan dan diganti menggunakan variabel Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini akan memfokuskan pada perusahaan berkategori manufaktur, sedangkan penelitian Yunita dan Andri mengambil populasi perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*.

Wulan dan Yeterina (2011) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Variabel dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan saham asing dan komposisi dewan komisaris independen. Dari variabel tersebut hanya kepemilikan saham asing yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Persamaan penelitian yang dilakukan Wulan dan Yeterina adalah menggunakan empat variabel yang sama yaitu Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Saham Asing dan Independensi Dewan Komisaris. Tetapi pada penelitian ini menambahkan beberapa variabel

yang tidak digunakan oleh Wulan dan Yeterina. Diantaranya adalah, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan jumlah Rapat Dewan Komisaris.

Ni Wayan Rustriani yang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, sedangkan Kepemilikan Saham Asing berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan variabel yang sama dalam penelitian Ni Wayan Rustriani dengan menambahkan variabel Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengindikasikan faktor *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Asing dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen. (FCGI, 2009).

Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi dalam sebuah perusahaan, yang tugas utamanya adalah untuk memonitor tindakan yang dilakukan manajemen. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar Ukuran Dewan Komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian (*experience and expertise*) yang dimiliki oleh dewan komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktifitas monitoring dengan lebih baik (Akhtarudin, *et. al.*, 2009) dalam Waryanto (2011:45). Dengan adanya proses monitoring yang lebih baik, maka diharapkan pengungkapan informasi mengenai CSR bisa semakin luas, dikarenakan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. BEJ menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEJ harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan, jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen diharapkan bisa mengawasi tindakan yang dilakukan oleh manajemen dengan lebih baik, mengingat bahwa Komisaris Independen berasal bukan dari golongan terafiliasi. Dengan demikian, semakin besar komposisi Dewan Komisaris Independen, maka kemampuan Dewan Komisaris untuk

mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. Dengan demikian hal ini akan mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas.

Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-29/PM/2004 menyebutkan bahwa Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dimana sekurang – kurangnya 1 (satu) orang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Menurut Forker (1992) dalam Yunita (2011:9), Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan.

Ni Wayan (2009:13) menyatakan bahwa secara statistik rata-rata jumlah Kepemilikan Saham Manajerial pada perusahaan di Indonesia relatif kecil sehingga belum terdapat keselarasan kepentingan antara pemilik dan manajer. Kepemilikan Manajerial yang relatif kecil menyebabkan manajer belum dapat memaksimalkan pengungkapan CSR, hal ini dikarenakan manajer dengan kepemilikan saham dibawah 5% belum mempunyai kendali penuh terhadap pengambilan keputusan perusahaan.

Kepemilikan Institusional di Indonesia belum mempertimbangkan Tanggung Jawab Sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan

investasi, sehingga para investor cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas CSR (Ni Wayan, 2009:14). Hal ini mungkin disebabkan karena selama ini investor institusional hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi saja tanpa memperdulikan tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholders lainnya.

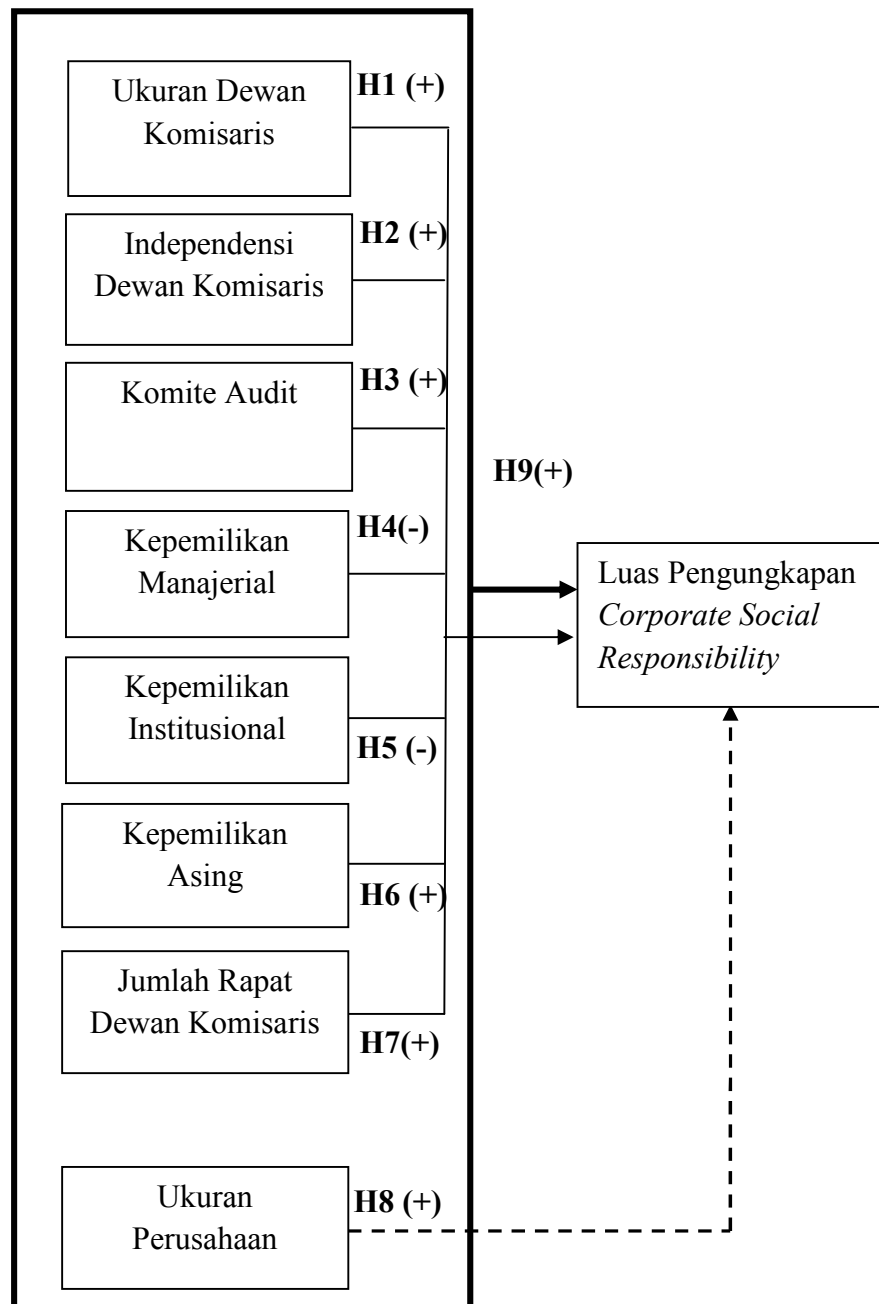
Penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan Yeterina (2011) menemukan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Seperti yang diketahui, negara-negara di Eropa sangat memperhatikan isu-isu sosial yang berkembang misalnya, hak pada pengendalian dan pengawasan terhadap pihak manajemen dalam operasi perusahaan, salah satunya adalah pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR). Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas.

Rapat Dewan Komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Dalam rapat terdapat beberapa suara yang akan diambil menjadi satu keputusan bulat dengan musyawarah mufakat (Waryanto, 2011:46). Rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, mengatasi

masalah benturan kepentingan (FCGI, 2009). Oleh karena itu, dengan semakin sering dewan komisaris mengadakan pertemuan, diharapkan mekanisme pengawasan perusahaan dapat dilakukan dengan baik dan mendorong pengungkapan informasi perusahaan yang lebih transparan.

D. Paradigma Penelitian

Dari uraian diatas kerangka berfikir digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Gambar 3. Paradigma penelitian

Keterangan :

————▶ = Pengaruh interaksi masing-masing variabel independen, Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

-----▶ = Interaksi variabel kontrol Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

————▶ = Pengaruh interaksi Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

- H2 = Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- H3 = Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- H4 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* .
- H5 = Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* .
- H6 = Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* .
- H7 = Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* .
- H8 = Variabel kontrol Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* .
- H9 = Terdapat pengaruh secara bersama-sama atau simultan Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011. Data tersebut diambil melalui website resmi Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id dan juga melalui website perusahaan yang berkaitan. Pemilihan sampel pada perusahaan manufaktur berdasarkan beberapa alasan. Pertama, ketersediaan laporan tahunan perusahaan. Kedua, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang jenis operasinya mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan lebih tinggi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menurut pendekatannya merupakan *ex post facto*. Penelitian *ex post facto* merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut (Sugiyono, 2005:10)

C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti diklasifikasikan menjadi dua variabel, yaitu:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan yang dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI meliputi 79 item pengungkapan yang meliputi: *economic* (EC), *environment* (EN), *humanrights* (HR), *labor practices* (LP), *product responsibility* (PR) dan *society* (SO). Perhitungan Indeks Luas Pengungkapan CSR (CSRDI) dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRDI = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{79}$$

Pengukuran luas pengungkapan CSR dalam penelitian ini dilakukan secara non repeated, artinya hanya menghitung satu kali untuk setiap item tanpa mempertimbangkan item tersebut diungkapkan lagi dalam halaman atau bagian lain dengan bahasa yang berbeda. Selain itu, pengukuran dilakukan dengan melihat pengungkapan yang termuat dalam laporan tahunan saja tanpa melihat dan mengukur kembali luas pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan yang khusus seperti sustainability report, dikarenakan tidak semua perusahaan menerbitkan sustainability report tersebut.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi :

a. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris dihitung dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan. Pengukuran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DK = \sum \text{Dewan Komisaris Perusahaan}$$

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal suatu perusahaan, yang terdapat di akhir periode laporan tahunan.

b. Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Independensi Dewan Komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen dalam suatu dewan komisaris perusahaan. Independensi Dewan Komisaris diukur dengan rasio

atau jumlah (%) antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris.

c. Komite Audit

Komite Audit merupakan jumlah anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan. Ukuran Komite Audit dihitung dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan.

d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, Kepemilikan Manajerial diukur dengan menghitung persentase (%) jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yaitu manajer, komisaris terafiliasi (diluar komisaris independen), dan direksi dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar.

e. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan Institusional dinyatakan dalam persentase (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar.

f. Kepemilikan Saham Asing

Kepemilikan Saham Asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap perusahaan di Indonesia. Besarnya saham diukur dari persentase (%) dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing terhadap total saham yang beredar.

g. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah Rapat Dewan Komisaris merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun. Jumlah Rapat Dewan Komisaris diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan.

3. Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini menggunakan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Ukuran Perusahaan diukur berdasarkan total asset yang dimiliki oleh perusahaan dari laporan tahunan perusahaan. Ukuran Perusahaan yang diukur dari total asset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total asset perusahaan relative lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Ukuran Perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$SIZE = \log (\text{nilai buku total asset})$$

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2010-2011. Sedangkan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2010-2011
2. Perusahaan yang telah melakukan publikasi laporan tahunan (*annual report*).
3. Informasi Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan dalam periode 2010-2011.

Berdasarkan kriteria penentuan sampel penelitian di atas bahwa perusahaan yang memenuhi kriteria sampel adalah 15 perusahaan dalam setahun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Penentuan Sampel

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011	165
Data yang tidak berhasil diperoleh secara fisik baik di BEI maupun website perusahaan	(59)
Data yang tersedia secara fisik	106
Data rusak, tidak lengkap, dan tidak memenuhi kriteria	(91)
Jumlah data yang digunakan sebagai sampel	15

Dengan demikian data yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan. Jumlah sampel tersebut sesuai dengan teori *Central Limit Theorem (CLT)*, bahwa dalam menentukan jumlah sampel walaupun distribusi populasi tidak diketahui, distribusi samplingnya akan menjadi normal jika jumlah sampel mencukupi. Jumlah sampel yang dimaksud adalah minimal sebanyak 30 ($n=30$), dimana semakin besar jumlah sampel, distribusi samplingnya akan mendekati distribusi normal.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan tahunan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur pada periode tahun 2010-2011. Data tersebut diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh BEI, yakni www.idx.co.id dan website resmi perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, maksimum, minimum standar deviasi, varian.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat–syarat lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji linieritas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas sebelum melakukan pengujian hipotesis. Berikut ini penjelasan uji asumsi klasik yang akan digunakan.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil (Ghozali, 2011:160).

Ada dua cara untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat distribusi normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011:161).

Uji Kolmogorov cocok untuk memutuskan apakah sebuah sampel dapat berasal dari sebuah distribusi normal (Sprenst, 1991). Karena hasilnya berupa angka, bukan gambar, maka lebih mudah untuk memutuskan residual berdistribusi normal atau tidak.

b. Uji Linieritas

Analisis regresi linier dapat digunakan apabila asumsi linieritas dapat terpenuhi. Apabila asumsi tidak terpenuhi maka analisis regresi linier tidak dapat dilakukan. Uji linieritas adalah asumsi yang akan memastikan apakah data yang dimiliki sesuai

dengan garis linier atau tidak. Asumsi ini dapat diketahui melalui uji linieritas tabel Anova dengan mencari nilai *Deviation From Linearity* dari uji F linier. Jika angka pada *Deviation From Linearity* lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$), berarti hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah linier (Algifari, 2000).

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolinearitas antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011:105).

Ghozali (2011:105) mengatakan bahwa untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi dependen.
- 2) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini

merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya kolerasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas.

Multikolinearitas dapat disebabkan karena ada efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

- 3) Multikolinearitas juga dapat dilihat dari a) nilai tolerance dan lawannya b) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang tinggi sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance < 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ dengan tingkat kolonieritas 0.50.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual sehingga muncul untuk data runtut waktu tetapi menggunakan data silang waktu (crosssection) dan kemungkinan kecil terjadi autokorelasi, namun akan tetap dilakukan uji autokorelasi untuk lebih meyakinkan (Ghozali, 2011:110).

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokolerasi, diantaranya melalui uji Durbin-Watson (DW-Test). Dengan menggunakan uji Durbin Watson ini, akan didapatkan nilai DW. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) dan jumlah variabel. Suatu model dapat dikatakan bebas dari autokolerasi positif ataupun autokolerasi negatif apabila nilai DW tersebut lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari $4-du$.

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokolerasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali, 2011:111).

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dinamakan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Ada beberapa metode yang telah dikemukakan untuk menguji kehadiran situasi *heteroskedastisitas* dalam *varian error terms* suatu model regresi. Adapun metode-metode itu antara lain : (1) metode Park; (2) metode Glejser; (3) metode Goldfeld-Quandt; dan (4) metode *Spearman Rank Correlation* (Arief, 1992). Penelitian ini menggunakan model metode Park. Model metode Park adalah $\ln(e^2) = \alpha + \beta \ln X_i$. Jika secara statistik signifikan, maka hal ini menunjukkan kehadiran situasi heteroskedastisitas (Arief, 1992).

2. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2008:270) regresi sederhana berdasarkan pada hubungan atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap CSR, Independensi Dewan Komisaris terhadap CSR, Ukuran Komite Audit terhadap CSR, Kepemilikan Saham Manajerial terhadap CSR, Kepemilikan Saham Institusional terhadap CSR, Kepemilikan Saham Asing terhadap CSR, Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap CSR dan Ukuran Perusahaan terhadap CSR dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mencari persamaan garis regresi dengan satu prediktor

$$Y = ax + K$$

Keterangan:

Y = kriteria (*Corporate Social Responsibility*)

a = bilangan koefisien

x = prediktor (Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan)

K = bilangan konstanta

(Sutrisno Hadi, 2004:1)

- 2) Mencari koefisien determinasi sederhana (r^2) antara variabel X_n dengan Y.

Mencari determinasi digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi variabel X_n dengan Y. Koefisien determinasi juga menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. Perhitungan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$r^2_{(1)} = \frac{\alpha_1 \sum x_1 y}{\sum y^2}$$

$$r^2_{(2)} = \frac{\alpha_2 \sum x_2 y}{\sum Y^2}$$

$$r^2_{(3)} = \frac{\alpha_3 \sum x_3 y}{\sum y^2}$$

$$r^2_{(4)} = \frac{\alpha_4 \sum x_4 y}{\sum y^2}$$

$$r^2_{(5)} = \frac{\alpha_5 \sum x_5 y}{\sum y^2}$$

$$r^2_{(6)} = \frac{\alpha_6 \sum x_6 y}{\sum y^2}$$

$$r^2_{(7)} = \frac{\alpha_7 \sum x_7 y}{\sum y^2}$$

$$r^2_{(8)} = \frac{\alpha_8 \sum x_8 y}{\sum y^2}$$

Keterangan:

- $r^2_{(1)}$ = koefisien determinasi antara Ukuran Dewan Komisaris dengan CSR
 $r^2_{(2)}$ = koefisien determinasi antara Independensi Dewan Komisaris dengan CSR
 $r^2_{(3)}$ = koefisien determinasi antara Komite Audit dengan CSR
 $r^2_{(4)}$ = koefisien determinasi antara Kepemilikan Manajerial dengan CSR
 $r^2_{(5)}$ = koefisien determinasi antara Kepemilikan Institusional dengan CSR
 $r^2_{(6)}$ = koefisien determinasi antara Kepemilikan Asing dengan CSR
 $r^2_{(7)}$ = koefisien determinasi antara Rapat Dewan Komisaris dengan CSR
 $r^2_{(8)}$ = koefisien determinasi antara Size dengan CSR

α_1 = koefisien prediktor Ukuran Dewan Komisaris

α_2 = koefisien prediktor Independensi Dewan Komisaris

α_3 = koefisien prediktor Komite Audit

α_4 = koefisien prediktor Kepemilikan Manajerial

α_5 = koefisien prediktor Kepemilikan Institusional

α_6 = koefisien prediktor Kepemilikan Asing

α_7 = koefisien prediktor Rapat Dewan Komisaris

α_8 = koefisien prediktor Size

$\sum x_1 y$ = jumlah produk antara Dewan Komisaris dan CSR

$x_2 y$ = jumlah produk antara Independensi Dewan Komisaris dan CSR

$x_3 y$ = jumlah produk antara Komite Audit dan CSR

$x_4 y$ = jumlah produk antara Kepemilikan Manajerial dan CSR

$x_5 y$ = jumlah produk antara Kepemilikan Institusional dan CSR

$x_6 y$ = jumlah produk antara Kepemilikan Asing dan CSR

$x_7 y$ = jumlah produk antara Rapat Dewan Komisaris dan CSR

$x_8 y$ = jumlah produk antara Size dan CSR

y^2 = jumlah kuadrat kriterium Y

(Sutrisno Hadi, 2004:22)

3) Menguji Signifikansi dengan Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi dari setiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r(\sqrt{n-2})}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = t hitung
 r = koefisien korelasi
 n = jumlah sampel
 (Sugiyono, 2010:259)

Pengambilan kesimpulan adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5%, maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan. Sebaliknya jika t_{hitung} lebih kecil dibandingkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

Pengambilan kesimpulan H_0 diterima atau ditolak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Tingkat sig $t < \alpha = 0,05$ maka hipotesis penelitian didukung, artinya secara individual variabel independen yang terdiri dari Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Corporate Social Responsibility*.

- b) Tingkat $\text{sig } t > \alpha = 0,05$ maka hipotesis penelitian ini tidak didukung, artinya secara individual variabel independen yang terdiri dari Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu harga *Corporate Social Responsibility*.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Melalui analisis ini dapat diketahui koefisien korelasi variabel independen terhadap variabel dependen maupun koefisien determinasi variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi linear berganda ini langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut:

- 1) Membuat persamaan garis dengan delapan prediktor dengan rumus:

$$(a) Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_7X_7 + K$$

$$(b) Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_8X_8 + K$$

Keterangan:

Y	= kriterium
X ₁	= Ukuran Dewan Komisaris
X ₂	= Independensi Dewan Komisaris
X ₃	= Komite Audit
X ₄	= Kepemilikan Manajerial
X ₅	= Kepemilikan Institusional
X ₆	= Kepemilikan Asing
X ₇	= Rapat Dewan Komisaris
X ₈	= Size
a ₁	= koefisien prediktor Dewan Komisaris
a ₂	= koefisien prediktor Independensi Dewan Komisaris
a ₃	= koefisien prediktor Komite Audit
a ₄	= koefisien prediktor Kepemilikan Manajerial
a ₅	= koefisien prediktor Kepemilikan Institusional
a ₆	= koefisien prediktor Kepemilikan Saham Asing
a ₇	= koefisien prediktor Rapat Dewan Komisaris
a ₈	= koefisien prediktor Size
K	= bilangan konstanta

(Sutrisno Hadi, 2004:2)

- 2) Mencari koefisien korelasi ganda antara X₁, X₂, X₃, X₄, X₅, X₆, X₇, X₈ terhadap Y

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui variabel independen berpengaruh positif secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dikatakan memiliki pengaruh positif jika koefisien korelasi bernilai positif.

Koefisien korelasi dihitung dengan rumus:

$$R_{y(1,2,\dots,8)} = \sqrt{\frac{\alpha_1 \sum x_1 y + \alpha_2 \sum x_2 y + \dots + \alpha_8 \sum x_8 y}{\sum y^2}}$$

Keterangan:

$R_{y(1,2,\dots,7)}$	= koefisien korelasi antara X ₁ , X ₂ , ..., X ₈ dengan Y
α_1	= koefisien prediktor Ukuran Dewan Komisaris
α_2	= koefisien prediktor Independensi Dewan Komisaris

α_3	= koefisien prediktor Komite Audit
α_4	= koefisien prediktor Kepemilikan Manajerial
α_5	= koefisien prediktor Kepemilikan Institusional
α_6	= koefisien prediktor Kepemilikan Saham Asing
α_7	= koefisien prediktor Rapat Dewan Komisaris
α_7	= koefisien prediktor Size
$\sum x_1y$	= jumlah produk antara Dewan Komisaris dan CSR
x_2y	= jumlah produk antara Independensi Dewan Komisaris dan CSR
x_3y	= jumlah produk antara Komite Audit dan CSR
x_4y	= jumlah produk antara Kepemilikan Manajerial dan CSR
x_5y	= jumlah produk antara Kepemilikan Institusional dan CSR
x_6y	= jumlah produk antara Kepemilikan Saham Asing dan CSR
x_7y	= jumlah produk antara Rapat Dewan Komisaris dan CSR
x_8y	= jumlah produk antara Ukuran Perusahaan dan CSR
y^2	= jumlah kuadrat kriterium Y

(Sutrisno Hadi, 2004:22)

- 3) Mencari koefisien determinasi ganda (R^2) antara X_1, X_2, \dots, X_8 dengan Y

Koefisien determinasi ini dilakukan untuk menghitung besarnya kontribusi variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8$ secara simultan terhadap Y. Koefisien determinasi juga menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. Koefisien determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2_{(1,2,\dots,8)} = \frac{(\alpha_1 \sum x_1y + \alpha_2 \sum x_2y + \dots + \alpha_8 \sum x_8y)^2}{\sum y^2}$$

Keterangan:

$R^2_{(1,2,\dots,7)}$	=	koefisien determinasi antara $X_1, X_2 \dots X_7$ dengan Y
α_1	=	koefisien prediktor Dewan Komisaris
α_2	=	koefisien prediktor Independensi Dewan Komisaris
α_3	=	koefisien prediktor Komite Audit
α_4	=	koefisien prediktor Kepemilikan Manajerial
α_5	=	koefisien prediktor Kepemilikan Institusional
α_6	=	koefisien prediktor Kepemilikan Saham Asing
α_7	=	koefisien prediktor Rapat Dewan Komisaris
α_8	=	koefisien prediktor Ukuran Perusahaan
$\sum x^1 y$	=	jumlah produk antara Dewan Komisaris dan CSR
$\sum x^2 y$	=	jumlah produk antara Independensi Dewan Komisaris dan CSR
$\sum x^3 y$	=	jumlah produk antara Komite Audit dan CSR
$\sum x^4 y$	=	jumlah produk antara Kepemilikan Manajerial dan CSR
$\sum x^5 y$	=	jumlah produk antara Kepemilikan Institusional dan CSR
$\sum x^6 y$	=	jumlah produk antara Kepemilikan Saham Asing dan CSR
$\sum x^7 y$	=	jumlah produk antara Rapat Dewan Komisaris dan CSR
$\sum x^8 y$	=	jumlah produk antara Ukuran Perusahaan dan CSR
$\sum y^2$	=	jumlah kuadrat kriterium Y

(Sutrisno Hadi, 2004:22)

4) Menguji signifikansi regresi ganda dengan Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi regresi ganda $R_{y(1,2,\dots,8)}$. Hasil perhitungan tersebut kemudian dilihat pada tabel F_{tabel} pada taraf signifikansi 5%. Apabila F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dengan signifikansi 5% maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap

variabel dependen. Apabila F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{reg} = \frac{R^2(N - m - 1)}{m(1 - R^2)}$$

Keterangan:

F_{reg} = harga F garis regresi
 N = cacah kasus
 M = cacah prediktor
 R = koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor
 (Sutrisno Hadi, 2004:26)

Pengambilan kesimpulan H_0 diterima atau ditolak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Tingkat *sig* $F > \alpha = 0,05$ maka Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *corporate social responsibility*.
- (2) Tingkat *sig* $F > \alpha = 0,05$ maka Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *corporate social responsibility*.

- 5) Mencari besarnya sumbangan setiap variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8$) terhadap variabel terikat (Y).

(2) Sumbangan Relatif (SR%)

Sumbangan relative adalah persentase perbandingan relatifitas yang diberikan satu variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel-variabel lain. Rumus yang digunakan untuk mencari besarnya sumbangan relative adalah sebagai berikut:

$$SR\% = \frac{\alpha \sum xy}{JK_{reg}} \times 100\%$$

Keterangan:

SR% : Sumbangan relative dari suatu prediktor

α : Koefisien prediktor

$\sum xy$: Jumlah produk antara X dan Y

JK_{reg} : Jumlah kuadrat regresi

(Sutrisno Hadi, 2004:37)

(3) Sumbangan Efektif (SE%)

Sumbangan efektif adalah persentase perbandingan efektivitas yang diberikan satu variabel bebas kepada satu variabel terikat dengan variabel-variabel lain baik yang diteliti maupun tidak. Rumus yang digunakan untuk mencari besarnya sumbangan efektif adalah sebagai berikut:

$$SE\% = SR\% \times R^2$$

Keterangan:

SE% : Sumbangan efektif dari suatu prediktor.

SR% : Sumbangan relative dari suatu prediktor

R^2 : Koefisien determinasi

(Sutrisno Hadi, 2004:3)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang go publik di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2011. Jumlah populasi yang ada adalah sebanyak 165 perusahaan. Dari 165 perusahaan tersebut hanya ada 106 perusahaan yang mengungkapkan laporan tahunannya dan setelah melakukan seleksi sampel hanya terpilih 15 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Seleksi Sampel

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011	165
Data yang tidak berhasil diperoleh secara fisik baik di BEI maupun <i>website</i> perusahaan	(59)
Data yang tersedia secara fisik	106
Data rusak, tidak lengkap, dan tidak memenuhi kriteria	(91)
Jumlah data yang digunakan sebagai sampel	15

Adapun perusahaan yang dijadikan sampel dapat dilihat pada lampiran 1

B. Analisis Deskriptif

Berikut analisis deskriptif terhadap variabel penelitian, yaitu tentang deksirptive rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.Deskriptive Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	30	0,08	0,29	0,1593	0,06362
DK	30	2,00	11,00	4,5667	2,50080
IDK	30	0,25	0,50	0,3878	0,07695
KA	30	3,00	4,00	3,1333	0,34575
KM	30	0,02	25,61	3,0857	5,37207
KI	30	0,11	68,85	29,2513	24,13889
KSA	30	0,91	96,32	46,8037	29,77510
RDK	30	2,00	7,00	4,0667	0,98027
SIZE	30	8,45	15,18	12,0137	1,16231
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data diolah

Berdasarkan analisis deskriptif, Variabel tingkat pengungkapan Tanggung Jawab Sosial memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1593. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Tanggung Jawab Sosial masih rendah dengan persentase sebesar 15,93% dari seluruh pengungkapan laporan secara penuh. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,06362 berarti ukuran penyebaran dari tingkat pengungkapan Tanggung Jawab Sosial adalah sebesar 0,06362 dari 30 kasus yang terjadi. Artinya variasi dari pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam laporan keuangan yang dipublikasikan relatif cukup homogen antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel Ukuran Dewan Komisaris (DK) menunjukkan rata-rata sebesar 4,5667 yang berarti rata-rata perusahaan diawasi oleh dewan komisaris yang berjumlah kurang lebih 5 orang. Dengan demikian perusahaan telah memiliki komisaris yang cukup untuk memberikan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan kinerja perusahaan. Dengan standar deviasi sebesar 2,5008 menunjukkan

ukuran penyebaran ukuran dewan komisaris cenderung homogen, karena lebih kecil daripada nilai rata-ratanya

Dari analisis deskriptif diatas menunjukkan bahwa rata-rata dewan komisaris Independen (IDK) memiliki rata-rata sebesar 0,3878 yang berarti rata-rata perusahaan memiliki dewan komisaris independent 38,78% dari seluruh dewan komisaris yang ada. Dengan demikian perusahaan telah memiliki komisaris independent yang cukup untuk memberikan pengawasan manajerial perusahaan, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK yaitu minimal 30% dari komisaris yang ada adalah komisaris independen. Dengan standar deviasi sebesar 0,07695 menunjukkan ukuran penyebaran komposisi dewan komisaris cenderung homogen, karena lebih kecil daripada nilai rata-ratanya

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel Komite Audit (KA) menunjukkan rata-rata sebesar 3,1333 yang berarti rata-rata perusahaan yang telah menempatkan Komite Audit dalam struktur pengawasannya sebanyak 3 orang dalam keanggotaan Komite Audit. Nilai standar deviasi sebesar 0,34575 lebih rendah dibandingkan dengan rata-ratanya menunjukkan bahwa fluktuasi jumlah Komite Audit cukup homogen karena lebih rendah dibandingkan rata-ratanya.

Hasil deskriptif terhadap Kepemilikan Manajerial (KM) diperoleh rata-rata sebesar 3,0857 yang berarti rata –rata saham yang dimiliki oleh manajer adalah sebesar 3,0857% dari total seluruh kepemilikan saham yang ada. Sedangkan Kepemilikan Institusional rata-rata adalah sebesar

29,2513%. dan Kepemilikan Asing sebesar 46,803. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia mayoritas dikuasai oleh Kepemilikan Asing, dan berurutan kepemilikan institusi dan terakhir adalah Kepemilikan Manajerial.

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel jumlah rapat Dewan Komisaris memiliki nilai rata-rata sebesar 4,0677. Hal ini berarti rata-rata dalam satu tahun dewan komisaris yang ada melakukan rapat rata-rata 5 kali. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,98027, menunjukkan bahwa ukuran penyebaran data jumlah Rapat Dewan Komisaris cukup rendah karena lebih rendah dari nilai rata-ratanya.

Variabel kontrol Ukuran Perusahaan yang diukur dengan aktiva memiliki nilai rata-rata sebesar 12,01378 (logaritma) atau sebesar Rp.1.269,69 milyar. Hal ini berarti rata-rata Ukuran Perusahaan pada industri manufaktur cukup besar. Sedangkan standar deviasi sebesar 1.16231 menunjukkan bahwa ukuran penyebaran Ukuran Perusahaan cukup homogen karena lebih rendah dari nilai rata-ratanya. Hal ini wajar karena tujuan dari transformasi logaritma adalah mengurangi tingkat flutuasi data.

C. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

1. Uji penyimpangan asumsi klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F dan uji t terlebih dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Pengujian

ini dilakukan untuk menguji validitas dari hasil analisis regresi linier berganda. Pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji linieritas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang dipergunakan pada variabel penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji data berdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai probabilitas (sig) pada *Kolmogorov Smirnov Test* $> 0,05$, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika $\text{sig} \leq 0,05$ data tidak berdistribusi normal. Hasil uji Kolmogoros Smirnov dapat ditunjukkan pada Tabel 4

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,03903042
Most Extreme Differences	Absolute	0,114
	Positive	0,074
	Negative	-0,114
Kolmogorov-Smirnov Z		0,625
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,829

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,625 dan probabilitas (sig) sebesar 0,829. Dengan demikian nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha =$

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian yang digunakan dalam analisis regresi telah berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas

Uji linieritas adalah asumsi yang akan memastikan apakah data yang dimiliki sesuai dengan garis linier atau tidak. Asumsi ini dapat diketahui melalui uji linieritas tabel Anova dengan mencari nilai *Deviation From Linearity* dari uji F linier. Jika angka pada *Deviation From Linearity* lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$), berarti hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah linier (Algifari, 2000). Hasil uji linieritas dapat ditunjukkan pada Tabel 5..

Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Linieritas

No	Hubungan	F _{Hitung}	Sig	Keterangan
1	X1 dengan Y	1,707	0,173	Linier
2	X2 dengan Y	2,530	0,067	Linier
3	X3 dengan Y	0,604	0,444	Linier
4	X4 dengan Y	1,236	0,354	Linier
5	X5 dengan Y	5,241	0,059	Linier
6	X6 dengan Y	3,377	0,068	Linier
7	X7 dengan Y	2,132	0,108	Linier

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji linieritas pada tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki hubungan yang linier, karena memiliki probabilitas $> 0,05$.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam sebuah model

regresi berganda. Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya problem multikolinieritas pada sebuah model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dimana nilai VIF harus dibawah nilai 10. Jika nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) hasil regresi lebih besar dari 10 maka dapat dipastikan ada multikolinieritas diantara variabel bebas tersebut. Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
DK	0,453	2,208	Tidak Terjadi Multikolinieritas
IDK	0,731	1,368	Tidak Terjadi Multikolinieritas
KA	0,546	1,833	Tidak Terjadi Multikolinieritas
KM	0,720	1,388	Tidak Terjadi Multikolinieritas
KI	0,220	4,536	Tidak Terjadi Multikolinieritas
KSA	0,172	5,802	Tidak Terjadi Multikolinieritas
RDK	0,624	1,602	Tidak Terjadi Multikolinieritas
SIZE	0,717	1,394	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 6 di atas nilai VIF untuk seluruh variabel bebas yang terdiri dari Ukuran Dewan Komisaris, komisaris independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, kepemilikan saham asing, jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan memiliki nilai VIF dibawah 10, sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinieritas

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menurut Algifari (2000:88) adalah adanya korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasar waktu. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Suatu model dapat dikatakan bebas dari autokorelasi positif ataupun autokorelasi negatif apabila nilai DW tersebut lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari $4-du$. Berdasarkan jumlah observasi $N=30$, jumlah variabel bebas (k)=8 maka dapat diketahui nilai $Du = 2,141$ dan $4-du = 1,859$. Hasil uji Autokorelasi dapat ditunjukkan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Statistik Durbin Watson

Kriteria DW	Hasil Uji DW	Kesimpulan
1,859 s/d 2,141	2,056	Tidak ada autokorelasi

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil olah regresi diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,056 yang berada diantara 1,859 sampai dengan 2,141 yaitu berada pada daerah tidak ada autokorelasi, sehingga disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi Autokorelasi.

e. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi lain. Untuk menguji

Heteroskedastisitas digunakan uji Park. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	t	Sig	Keterangan
(Constant)	-1,001	0,328	Tidak ada Heteroskedastisitas
DK	0,087	0,931	Tidak ada Heteroskedastisitas
IDK	-0,853	0,403	Tidak ada Heteroskedastisitas
KA	-1,706	0,103	Tidak ada Heteroskedastisitas
KM	-0,593	0,560	Tidak ada Heteroskedastisitas
KI	1,627	0,119	Tidak ada Heteroskedastisitas
KSA	1,912	0,070	Tidak ada Heteroskedastisitas
RDK	-0,861	0,399	Tidak ada Heteroskedastisitas
SIZE	0,479	0,637	Tidak ada Heteroskedastisitas
Dependen Var: Lne2			

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen tidak berhubungan secara signifikan dengan residual yang terbukti dari nilai sig $>0,05$, sehingga model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Pengujian Hipotesis Penelitian

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan Analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh secara serentak variabel Independen terhadap Variabel Dependen.

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana digunakan untuk menguji Hipotesis 1-8. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana dapat ditunjukkan pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

	Var. Independen	Koef. Reg	T	sig	R 2	Keterangan
1	(Constant) DK	0,096 0,014	4,594 3,433	0,000 0,002	0,296	H1 didukung
2	(Constant) IDK	0,137 0,057	2,227 0,367	0,034 0,717	0,005	H2 Tidak didukung
3	(Constant) KA	0,076 0,027	0,697 0,777	0,492 0,444	0,021	H3 Tidak didukung
4	(Constant) KM	0,168 -0,003	12,610 -1,271	0,000 0,214	0,055	H4 Tidak didukung
5	(Constant) KI	0,188 -0,001	10,821 -2,140	0,000 0,041	0,141	H5 didukung
6	(Constant) KSA	0,110 0,001	5,671 3,012	0,000 0,005	0,245	H6 didukung
7	(Constant) RDK	0,199 -0,010	3,917 -0,795	0,001 0,433	0,022	H7 tidak didukung
8	(Constant) SIZE	-0,183 0,029	-1,720 3,229	0,097 0,003	0,271	H8 didukung

a. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap CSR

Persamaan regresinya adalah :

$$Y = 0,096 + 0,014 X_1$$

Ukuran Dewan Komisaris (DK) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,014, yang berarti setiap peningkatan dewan direksi 1 orang akan meningkatkan keluasan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial sebesar 0,014 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Jika ditinjau dari nilai *R Square* sebesar 0,296, artinya bahwa luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan oleh variabel Ukuran Dewan Komisaris sebesar 29,6%. Sedangkan sisanya sebesar 70,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dengan nilai *t* hitung sebesar 3,433 dan probabilitas sebesar $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini didukung.

b. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap CSR

Persamaan regresinya adalah :

$$Y = 0,137 + 0,057 X_2$$

Independensi Dewan Komisaris (IDK) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,057, yang berarti setiap peningkatan independensi dewan direksi 1 persen akan meningkatkan keluasan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial sebesar 0,057 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Jika ditinjau dari nilai *R Square* sebesar 0,005, artinya bahwa luas pengungkapan *Corporate*

Social Responsibility dapat dijelaskan oleh variabel Independensi Dewan Komisaris hanya sebesar 0,5%. Sedangkan sisanya sebesar 99,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dengan nilai t hitung sebesar 0,367 dan probabilitas sebesar $0,717 > 0,05$, maka H_0 diterima, yang berarti Independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian hipotesis kedua penelitian ini tidak didukung.

c. Pengaruh Komite Audit terhadap CSR

Persamaan regresinya adalah :

$$Y = 0,076 + 0,027 X_3$$

Komite Audit (KA) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,027, yang berarti setiap peningkatan Komite Audit 1 orang akan meningkatkan keluasan pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 0,027 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Jika ditinjau dari nilai *R Square* sebesar 0,021, artinya bahwa luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan oleh variabel Komite Audit hanya sebesar 2,1%. Sedangkan sisanya sebesar 97,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dengan nilai t hitung sebesar 0,777 dan probabilitas sebesar $0,444 > 0,05$, maka H_0 diterima, yang berarti Komite Audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap

luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian hipotesis ketiga penelitian ini tidak didukung.

d. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap CSR

Persamaan regresinya adalah :

$$Y = 0,168 - 0,003X_4$$

Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,003, yang berarti setiap peningkatan jumlah saham yang dimiliki manajer sebesar 1 persen akan menurunkan keluasan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial sebesar 0,003 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Jika ditinjau dari nilai *R Square* sebesar 0,055, artinya bahwa luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Manajerial hanya sebesar 5,5%. Sedangkan sisanya sebesar 94,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Dengan nilai t hitung sebesar -1,271 dan probabilitas sebesar $0,214 > 0,05$, maka H_0 diterima, yang berarti kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian hipotesis keempat penelitian ini tidak didukung.

e. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap CSR

Persamaan regresinya adalah :

$$Y = 0,188 - 0,001X_5$$

Hasil pengujian pada variabel Kepemilikan Institusional (KI) memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,001, yang berarti setiap peningkatan jumlah saham yang dimiliki kelompok institusional sebesar 1 persen akan menurunkan keluasan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial sebesar 0,001 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Jika ditinjau dari nilai *R Square* sebesar 0,141, artinya bahwa luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Institusional sebesar 14,1%. Sedangkan sisanya sebesar 85,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Dengan nilai *t* hitung sebesar -2,140 dan probabilitas sebesar $0,041 < 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian hipotesis kelima penelitian ini didukung.

f. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap CSR

Persamaan regresinya adalah :

$$Y = 0,110 + 0,001X_6$$

Hasil pengujian pada variabel Kepemilikan Asing (KSA) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,001, yang berarti setiap peningkatan jumlah saham yang dimiliki kelompok asing sebesar 1 persen akan meningkat keluasan pengungkapan Tanggung Jawab

Sosial sebesar 0,001 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Jika ditinjau dari nilai *R Square* sebesar 0,245, artinya bahwa luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Asing sebesar 24,5%. Sedangkan sisanya sebesar 75,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dengan nilai t hitung sebesar 3,012 dan probabilitas sebesar $0,005 < 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian hipotesis keenam penelitian ini didukung.

g. Pengaruh Rapat Dewan Komisaris terhadap CSR

Persamaan regresinya adalah :

$$Y = 0,199 - 0,010X_7$$

Jumlah Rapat Dewan Komisaris (RDK) memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,010, yang berarti setiap peningkatan jumlah rapat dewan komisaris sebesar 1 kali akan menurunkan keluasan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial sebesar 0,010 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Jika ditinjau dari nilai *R Square* sebesar 0,022, artinya bahwa luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan oleh variabel jumlah Rapat Dewan Komisaris hanya sebesar 2,2%. Sedangkan sisanya sebesar 97,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dengan nilai t hitung sebesar -0,795

dan probabilitas sebesar $0,433 > 0,05$, maka H_0 diterima, yang berarti jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian hipotesis ketujuh penelitian ini tidak didukung.

h. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap CSR

Persamaan regresinya adalah :

$$Y = -0,183 + 0,029 X_8$$

Variabel kontrol Ukuran Perusahaan (Size) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,029, yang berarti setiap peningkatan Ukuran Perusahaan sebesar 1 kali akan meningkatkan keluasan pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 0,029 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Jika ditinjau dari nilai *R Square* sebesar 0,271, artinya bahwa luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan oleh variabel Ukuran Perusahaan sebesar 27,1%. Sedangkan sisanya sebesar 72,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dengan nilai t hitung sebesar 3,229 dan probabilitas sebesar $0,003 < 0,05$, maka dapat diartikan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji Hipotesis ke-9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dapat ditunjukkan pada Tabel 10 dan Tabel 11 berikut:

Tabel 10. Hasil Regresi Linier Berganda tanpa menggunakan Size

Var. Independen	Koef. Reg	t	sig	F	Sig	R	R 2	Keterangan
(Constant)	0,270	2,367	0,027	3,338	0,014	0,718	0,515	Didukung
DK	0,015	2,934	0,008					
IDK	-0,023	-0,159	0,875					
KA	-0,080	-2,161	0,042					
KM	0,0004	-0,205	0,839					
KI	0,0002	0,284	0,779					
KSA	0,001	1,600	0,124					
RDK	0,004	0,298	0,769					

Berdasarkan hasil Tabel 10 dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,270 + 0,015X_1 - 0,023X_2 - 0,080 X_3 + 0,0004X_4 + 0,0002X_5 + 0,001X_6 + 0,004 X_7$$

a. Koefisien Korelasi Berganda

Koefisien Korelasi Berganda (R) menjelaskan seberapa kuat hubungan antara 7 variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R) sebesar 0,718 menunjukkan bahwa hubungan antara dewan komisaris,

independen dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan rapat dewan komisaris dengan CSR adalah kuat. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi berganda mendekati angka 1.

b. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka sebesar 0,515 artinya besarnya kontribusi kedelapan variabel bebas tersebut terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebesar 51,5%, sedangkan sisanya 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

c. Uji Signifikansi

Untuk menguji apakah Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, kepemilikan saham asing, Rapat Dewan Komisaris berpengaruh secara bersama-sama terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dilakukan dengan uji F. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (sig) dengan taraf signifikansi $\alpha=0,05$. Jika $sig F < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil perhitungan seperti dalam tabel 10 di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 3.338

dan sig-F sebesar 0.014, dengan demikian sig < 0,05, artinya Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Asing dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris secara bersama-sama berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Corporate Social Responsibility*.

Tabel 11. Hasil Regresi Linier Berganda dengan menggunakan Size

Var. Independen	Koef. Reg	t	sig	F	Sig	R	R 2	Keterangan
(Constant)	0,075	0,578	0,569	4,350	0,003	0,790	0,624	Didukung
DK	0,011	2,193	0,040					
IDK	-0,027	-0,212	0,834					
KA	-0,086	-2,574	0,018					
KM	-0,0001	-0,071	0,944					
KI	0,0003	0,377	0,710					
KSA	0,001	1,796	0,087					
RDK	-0,002	-0,191	0,851					
SIZE	0,021	2,461	0,023					

Berdasarkan hasil Tabel 11 dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,075 + 0,011X_1 - 0,027X_2 - 0,086 X_3 - 0,0001X_4 + 0,00003X_5 + 0,001X_6 - 0,002 X_7 + 0,021 X_8$$

d. Koefisien Korelasi Berganda

Koefisien Korelasi Berganda (R) menjelaskan seberapa kuat hubungan antara 7 variabel independen dan 1 variabel kontrol dengan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R) sebesar

0,790 menunjukkan bahwa hubungan antara dewan komisaris, independen dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, rapat dewan komisaris dan size dengan CSR adalah kuat. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi berganda mendekati angka 1.

e. Koefisien Deteriminasi

Untuk mengetahui pengaruh antara Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan (Size) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Corporate Social Responsibility* digunakan koefisien Determinasi (R^2). Hasil analisis determinasi berganda adalah sebesar 0,624 yang berarti CSR 62,4% dapat dijelaskan oleh kedelapan variabel independen, dan sisanya sebesar 37,6% CSR dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

f. Uji Signifikansi

Untuk menguji apakah Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, kepemilikan saham asing, Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap luas pengungkapan *Corporate*

Social Responsibility dilakukan dengan uji F. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (sig) dengan taraf signifikansi $\alpha=0,05$. Jika sig F < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dari hasil perhitungan seperti dalam tabel 11 di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 4,350 dan sig-F sebesar 0,003, dengan demikian sig < 0,05, artinya Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan (Size) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Corporate Social Responsibility*.

Sedangkan untuk mengetahui variabel yang dominan atau paling berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat dari nilai sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif seperti pada tabel berikut:

Tabel 12. Sumbangan Efektif dan Relatif

	Korelasi Parsial	Sumbangan Efektif (%)	Sumbangan Relatif (%)
DK	0.432	13,9%	22,2%
IDK	0,046	1,5%	2,4%
KA	0,490	15,7%	25,2%
KM	0,016	0,5%	0,8%
KI	0,082	2,6%	4,2%
KSA	0,365	11,7%	18,8%
RDK	0,042	1,3%	2,2%
SIZE	0,473	15,2%	24,3%
	Jumlah	62,4%	100,0%

Sumber : Data sekunder diolah, 2013

Berdasarkan hasil sumbangan efektif dan relatif, variabel mekanisme *Corporate governance* yang paling besar pengaruhnya terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah Komite Audit dengan sumbangan efektif sebesar 15,7% dan sumbangan relatif sebesar 25,2%. Selanjutnya secara berurutan diikuti oleh variabel kontrol Size dengan sumbangan efektif sebesar 15,2% dan sumbangan relatif sebesar 24,3%, Ukuran Dewan Komisaris dengan sumbangan efektif sebesar 13,9% dan sumbangan relatif sebesar 22,2%, Kepemilikan Asing dengan sumbangan efektif sebesar 11,7% dan sumbangan relatif sebesar 18,8%, Kepemilikan Institusional dengan sumbangan efektif sebesar 2,6% dan sumbangan relatif sebesar 4,2%, Independensi Dewan Komisaris dengan sumbangan efektif sebesar 1,5% dan sumbangan relatif sebesar 2,4% dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan sumbangan efektif sebesar 1,3% dan sumbangan relatif sebesar 2,2%.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan *Corporatae Social Responsibility*

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi linier sederhana menemukan bahwa Ukuran Dewan Komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berarti semakin banyak dalam penempatan Dewan Komisaris suatu perusahaan, maka akan semakin baik dalam implementasi *Corporate governance* sebuah perusahaan, sehingga akan meningkatkan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen. (FCGI, 2009).

Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi dalam sebuah perusahaan, yang tugas utamanya adalah untuk memonitor tindakan yang dilakukan manajemen. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar Ukuran Dewan Komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian (*experience and expertise*) yang dimiliki oleh Dewan Komisaris semakin meningkat, sehingga

dapat melakukan aktifitas monitoring dengan lebih baik (Akhtarudin, et. al., 2009) dalam Waryanto (2011). Dengan adanya proses monitoring yang lebih baik, maka diharapkan pengungkapan informasi mengenai CSR bisa semakin luas, dikarenakan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi.

2. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Hasil ini konsisten dengan penelitian Wulan dan Yeterina (2011) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak dapat berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Penjelasan yang mungkin atas fenomena ini adalah terdapat indikasi adanya kemungkinan pemilihan dan pengangkatan Komisaris Independen yang kurang efektif. Hal ini merupakan isu atau hal yang penting, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris Independen tidak dapat menunjukkan independensinya atau sebenarnya tidak independen (*not truly independent*), sehingga fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, keberadaan atau proporsi Komisaris Independen belum dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Hasil analisis menemukan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yunita dan Andri (2011) yang menemukan bahwa ukuran Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

Hal ini kemungkinan disebabkan karena efektifitas Komite Audit tidak didasarkan pada jumlah/banyaknya anggota Komite Audit, tetapi kualitas dari SDM yang ada. Anggota Komite Audit yang kurang memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; atau anggota Komite Audit yang latar belakang pendidikan dari non akuntansi atau keuangan sehingga pengetahuan dan pemahaman terhadap laporan keuangan kurang profesional. Hal inilah yang menyebabkan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Hasil analisis menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

Wulan dan Yeterina (2011) yang menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya Kepemilikan Manajerial hanya berfungsi untuk mengurangi agency cost yang ada dalam perusahaan, ketika terjadi konflik antara manajer dan investor. Memang dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer tidak akan berani mengurangi besarnya pengungkapan CSR, karena keputusan yang salah ini akan berakibat pada kepercayaan yang rendah investor terhadap manajer.

5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Hasil analisis menemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Kepemilikan Institusional semakin rendah luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, dana pensiun, asuransi, reksadana dan institusi lain. Kepemilikan oleh institusional dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen

dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan (Murwaningsari, 2009). Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan. Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai. Monitoring yang dilakukan oleh institusi inilah yang akan menekan manajemen agar tidak bertindak menyimpang.

6. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Hasil analisis menemukan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan saham oleh kelompok asing, maka semakin besar luas pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wulan dan Yeterina (2011) yang menemukan bahwa kepemilikan saham asing yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan Asing salah satu karakteristik *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas. Hal ini disebabkan karena Investor asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih lama mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR. Selain itu perusahaan asing mendapatkan

pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Dan kemungkinan lain adalah permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum. Seperti yang diketahui, negara-negara di Eropa sangat memperhatikan isu-isu sosial yang berkembang misalnya, hak pada pengendalian dan pengawasan terhadap pihak manajemen dalam operasi perusahaan, salah satunya adalah pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR). Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas.

7. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Hasil analisis menemukan bahwa jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yunita dan Andri (2011) yang menemukan bahwa jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Rapat Dewan Komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan

perusahaan. Berdasarkan data penelitian rata-rata perusahaan sangat minim dalam melakukan Rapat Dewan Komisaris yaitu hanya 4 kali dalam setahun, sehingga Rapat Dewan Komisaris ini kurang efektif sebagai media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Ketidakefektifan inilah yang menyebabkan variabel ini belum berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

8. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Hasil analisis menemukan bahwa variabel kontrol Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan Yeterina (2011) yang menemukan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Socila Responsibility*.

Dalam teori agensi disebutkan bahwa Ukuran Perusahaan yang besar juga berarti akan mengeluarkan biaya keagenan yang besar. Sehingga untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Disamping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi

biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan disekitarnya.

9. Pengaruh secara bersama-sama atau simultan Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menemukan bahwa secara serentak Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan besarnya kontribusi kedelapan variabel tersebut terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebesar 62,4%, sedangkan sisanya 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang terukur dalam Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol akan mendorong manajemen untuk melaporkan pengungkapan

CSR yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan *stakeholders* lainnya agar seimbang hak dan kewajibannya (publikasi FCGI). GCG bertujuan untuk mengatur perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholders*-nya. Perusahaan harus memperhatikan hal tersebut karena dalam operasionalnya perusahaan tidak hidup sendiri, melainkan bersama lingkungan sekitar. Oleh karena itu perusahaan harus menjaga lingkungannya agar secara timbal balik, baik perusahaan maupun masyarakat tidak ada yang dirugikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berarti semakin besar penempatan komisaris maka semakin besar pengawasan terhadap manajemen sehingga dalam penyampaian informasi akan lebih transparan, sehingga pengungkapan CSR menjadi semakin luas.
2. Independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini lebih disebabkan kurangnya independensi dari dewan komisaris sehingga pengawasan menjadi lemah dan hal ini belum mempengaruhi luas pengungkapan CSR.
3. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya anggota Komite Audit belum mempengaruhi luas pengungkapan CSR.
4. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini disebabkan

karena rendahnya persentase Kepemilikan Manajer, sehingga belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap luas pengungkapan CSR.

5. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berarti semakin besar Kepemilikan Institusional semakin rendah luas pengungkapan CSR.
6. Kepemilikan Asing berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berarti semakin besar Kepemilikan Asing semakin tinggi pula luas pengungkapan CSR. Investor asing lebih memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan yang sedang berkembang, sehingga tuntutan terhadap pengungkapan CSR akan semakin besar.
7. Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini disebabkan karena masih minimnya Jumlah Rapat Komisaris per tahunnya yaitu hanya 4 kali per tahun, sehingga belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap luas pengungkapan CSR.
8. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berarti perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki aktifitas operasi yang lebih banyak dan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, sehingga pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) perusahaan juga akan semakin luas.

9. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menemukan bahwa secara serentak Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan besarnya kontribusi kedelapan variabel bebas tersebut terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebesar 62,4%, sedangkan sisanya 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa saran diantaranya yaitu:

1. Bagi investor dan investor potensial yaitu bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter, tetapi juga pada kepedulian sosial, misalnya memilih perusahaan yang memiliki Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan yang lebih besar karena cenderung akan mengungkapkan CSR yang lebih luas.
2. Bagi perusahaan berkaitan dengan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial yang telah mereka lakukan selama ini, hasil penelitian ini

selanjutnya dapat menjadikan perusahaan lebih peduli terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial di masa mendatang, dengan alasan bahwa pengungkapan CSR tersebut tidak hanya dilihat sebagai *cost* tetapi merupakan sesuatu yang penting dan bermanfaat karena dapat meningkatkan nilai perusahaan, *competitive advantage*, serta *corporate sustainability*;

3. Bagi Badan Penyusun Standar Akuntansi dan Badan Otoritas Pasar Modal mengenai relevansi dari pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam laporan tahunan perusahaan, hasil penelitian ini selanjutnya dapat menjadi masukan dalam mempertimbangkan apakah informasi CSR sudah waktunya diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan atau tidak. Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan, mengubah, menambah dan menjelaskan standar akuntansi yang berlaku untuk menciptakan pasar modal yang efisien.
4. Bagi Pemerintah mengenai gambaran sampai sejauh mana pengungkapan Tanggung Jawab Sosial telah dilakukan perusahaan. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan, merumuskan, dan menetapkan suatu standar pelaporan CSR yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Pemerintah juga diharapkan dapat menindaklanjuti pengesahan UU Perseroan Terbatas, dengan mewajibkan semua perusahaan untuk melaksanakan CSR;

5. Bagi masyarakat yaitu bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus secara proaktif sebagai penguat atas perilaku perusahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh
6. Bagi Akademisi yaitu bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keberadaan hasil riset mengenai Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan GCG yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya;
7. Bagi penelitian selanjutnya yaitu bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur untuk penelitian berikutnya. Penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan perbaikan dengan menggunakan sampel yang lebih banyak, sehingga dapat digeneralisasikan untuk perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zaenuddin. 2007. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Praktek Pengungkapan Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik, Page. 9-12. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Ahmad Nurkhin. 2009. Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Ardiantoro, Elvinaro dan Machfudz Dindin. 2011. *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). 2002. *Siaran Pers Badan Pengawas Pasar Modal*.
- Eka Nanda Putra. (2011). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr). *Skripsi* Universitas Diponegoro
- Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2009. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). *Seri Tata Kelola Perusahaan Jilid II*. Jakarta.
- Ghozali, I dan A. Chairi, 2007. Teori Akuntansi, Page 13. Badan Penerbit Undip. Semarang
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*, Page 46-98. Yogyakarta: Graha Ilmu. .
- Jayanti Purnasiwi. (2011). Analisis Pengaruh Size, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Csr Pada Perusahaan Yang TerdaftarDi Bursa Efek Indonesia, *Page 30*. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Jensen, M. and Meckling, W. 1976. "Theory of the firm: manajerial behavior, agency costs and ownership structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3. Pp. 305-360.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. "Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia", Page 2-5. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 8 N0.1 Maret 2006.

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).2006.*Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Ni Wayan Rustriani. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Page 13-14. *Jurnal Penelitian*. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Bali
- Nike Nur Aini. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial pada Perusahaan Manufaktur di BEI, Page 11-32. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- RR.Wulan Wahyuningtyas dan Yeterina Widi Nugrahanti. 2011. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Siallagan, Hamonangan dan Machfoedz, Mas'ud. 2006. "Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang, 23-26 Agustus.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Page 52. Salemba Empat. Jakarta.
- Sritua, Arief. (1992). *Meode Penelitian Ekonomi*. Jakarta. UI Press
- Sugiyono.(2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Page 10-270. Bandung. Alfabeta
- Suranta, Edi dan Puspita, Pratama Merdiastuti. 2003. "Analisis Hubungan Struktur Kepemilikan Manajerial, Nilai Perusahaan dan Investasi dengan Model Persamaan Linear Simultan". *Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 1, h. 54-68*
- Sutopoyudo. 2009. "Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Profitabilitas Perusahaan. Sutopoyudo's Weblog at <http://www.wordpress.com>". Diakses tanggal 17 Januari 2013.
- Sutrisno Hadi. (2004). *Analisis Regresi*, Page 1-37. Yogyakarta. Andi
- Theresia Tyas Lisyani. 2002. Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan pengaruhnya terhadap Kepemilikan Institusional. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Waryanto. 2011. Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia, Page 1-55. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang

- Wening Kartikawati. 2009. “*Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*.” <http://hana3.wordpress.com/2009/05/17/pengaruh-kepemilikan-institusional-terhadap-kinerja-keuangan-perusahaan/>. Diakses tanggal 23 Januari 2013
- Yulius Jogi Christiawan dan Josua Tarigan. 2007. “Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*”, Vol. 9, No. 1, Mei 2007: 1-8
- Yunita Ratnasari dan Andri Prastiwi. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Dalam Sustainability Report. *Jurnal Penelitian*. Universitas Diponegoro. Semarang

LAMPIRAN

Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011

No	Nama Perusahaan	Kode
1	Astra Internasional Tbk	ASII
2	Pan Brothers	PBRX
3	Beton Jaya Manunggal	BTON
4	Citra Tubindo	CTBN
5	Gajah Tunggal Tbk	GJTL
6	Inti Keramik Alamsri Industri	IKAI
7	Kedawung Setia Industrial	KDSI
8	Langgeng Makmur Industri	LMPI
9	Lionmesh Prima Tbk	LMSH
10	Prima Alloy Steel Universal	PRAS
11	Selamat Sempurna Tbk	SMSM
12	Sunson Textile Manufacturer	SSTM
13	Unggul Indah Cahaya	UNIC
14	Eterindo Wahanatama Tbk	ETWA
15	Mandom Indonesia Tbk	TCID

GRI Sustainability Reporting GuideLines G3.

No	Indikator
	Indikator Kinerja Ekonomi
	Aspek: Kinerja Ekonomi
1	EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.
2	EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi
3	EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti
4	EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah
	Aspek : Kehadiran Pasar
5	EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.
6	EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan
7	EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.
	Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung
8	EC8 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.
9	EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya
	Indikator Kinerja Lingkungan
	Aspek: Material
10	EN1 Penggunaan bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume
11	EN2 Persentase penggunaan bahan daur ulang
	Aspek: Energi
12	EN3 Penggunaan energi langsung dari sumberdaya energi primer
13	EN4 Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber primer
14	EN5 Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi
15	EN6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
16	EN7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai
	Aspek: Air
17	EN8 Total pengambilan air per sumber
18	EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air
19	EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang
	Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)
20	EN11 Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh

	organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi
21	EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)
22	EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat
23	EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati
24	EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (<i>IUCN Red List Species</i>) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi
	Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah
25	EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat
26	EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat
27	EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya
28	EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (<i>ozone-depleting substances/ODS</i>) diperinci berdasarkan berat
29	EN20 NO _x , SO _x dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat
30	EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan
31	EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan
32	EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan
33	EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.
34	EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor
	Aspek: Produk dan Jasa
35	EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.
36	EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori
	Aspek: Kepatuhan
37	EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan
	Aspek: Pengangkutan/Transportasi
38	EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk

	operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan
	Aspek: Menyeluruh
39	EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis
	Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak
	Indikator Kinerja
40	LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.
41	LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah
42	LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.
	Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen
43	LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut
44	LA5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
	Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan
45	LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
46	LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah
47	LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan , anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.
48	LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.
	Aspek: Pelatihan dan Pendidikan
49	LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan
50	LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menjang kelangsungan pekerjaan karyawan akhir karier dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier
51	LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur
52	LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain
53	LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan.

	Hak Asasi Manusia
	Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan
54	HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia
55	HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM
56	HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan
	Aspek: Nondiskriminasi
57	HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.
	Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul
58	HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
	Aspek: Pekerja Anak
59	HR6 Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
	Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib
60	HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib
	Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan
61	HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi
	Aspek: Hak Penduduk Asli
62	HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah- langkah yang diambil
	Masyarakat
	Indikator Kinerja
	Aspek: Komunitas
63	S01 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.
	Aspek: Korupsi
64	S02 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi
65	S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur

	antikorupsi
66	S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi
	Aspek: Kebijakan Publik
67	S05 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan public
68	S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi
	Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing
69	S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya
	Aspek: Kepatuhan
70	S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan
	TANGGUNG JAWAB PRODUK
	Indikator Kinerja
	Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan
71	PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut
72	PR2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
	Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa
73	PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut
74	PR4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk
75	PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan
	Aspek: Komunikasi Pemasaran
76	PR6 Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship
77	PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya
	Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan
78	PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan

	Aspek: Kepatuhan
79	PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber : <https://www.globalreporting.org/>.diakses 17 Januari 2013

Data Variabel Penelitian Nilai Perusahaan tahun 2010-2011

No	Kode	Tahun	Perusahaan	CSR	DK	JKI	IDK	KA	KM	KI	KSA	RDK
1	ASII	2010	Astra Internasional tbk	0.21	11.00	5.00	45.5%	4.00	0.04	3.52	93.78	4.00
2	PBRX	2010	PT. Pan Brothers	0.12	3.00	1.00	33.3%	3.00	0.72	38.82	11.47	6.00
3	BTON	2010	Beton Jaya Manunggal	0.12	2.00	1.00	50.0%	3.00	9.58	1.67	79.87	4.00
4	CTBN	2010	Citra Tubindo	0.27	5.00	2.00	40.0%	3.00	0.03	3.50	96.32	2.00
5	GJTL	2010	gajah tunggal tbk	0.28	8.00	3.00	37.5%	3.00	0.08	0.12	61.72	4.00
6	IKAI	2010	Inti Keramik Alamsri Industri	0.15	2.00	1.00	50.0%	3.00	3.03	37.50	41.24	4.00
7	KDSI	2010	kedawung setia industrial	0.11	4.00	2.00	50.0%	3.00	0.03	56.00	25.70	5.00
8	LMPI	2010	PT langgeng makmur industri	0.08	2.00	1.00	50.0%	3.00	0.02	17.78	59.75	4.00
9	LMSH	2010	PT Lionmesh Prima tbk	0.11	3.00	1.00	33.3%	3.00	0.23	16.62	57.70	4.00
10	PRAS	2010	PT Prima Alloy Steel Universal	0.08	3.00	1.00	33.3%	3.00	5.91	42.60	0.91	4.00
11	SMSM	2010	PT Selamat Sempurna tbk	0.20	3.00	1.00	33.3%	3.00	6.03	68.85	24.07	4.00
12	SSTM	2010	PT. Sunson Textile Manufacturer	0.08	6.00	2.00	33.3%	3.00	7.51	53.74	35.72	3.00
13	IUNIC	2010	PT. Unggul Indah Cahaya	0.17	8.00	3.00	37.5%	3.00	0.04	66.71	11.23	3.00
14	ETWA	2010	PT. Eterindo Wahanatama tbk.	0.13	3.00	1.00	33.3%	3.00	0.06	8.16	55.63	7.00
15	TCID	2010	PT Mandom Indonesia tbk	0.12	5.00	2.00	40.0%	4.00	0.16	16.21	69.23	5.00
16	ASII	2011	Astra Internasional tbk	0.27	11.00	5.00	45.5%	4.00	0.04	5.25	94.71	4.00
17	PBRX	2011	PT. Pan Brothers	0.16	3.00	1.00	33.3%	3.00	0.42	58.60	3.89	5.00
18	BTON	2011	Beton Jaya Manunggal	0.16	2.00	1.00	50.0%	3.00	9.58	1.67	79.87	5.00
19	CTBN	2011	Citra Tubindo	0.26	5.00	2.00	40.0%	3.00	0.03	3.65	94.52	4.00
20	GJTL	2011	gajah tunggal tbk	0.29	8.00	3.00	37.5%	3.00	0.08	0.11	59.70	4.00
21	IKAI	2011	Inti Keramik Alamsri Industri	0.17	2.00	1.00	50.0%	3.00	3.03	37.50	41.24	4.00
22	KDSI	2011	kedawung setia industrial	0.13	4.00	2.00	50.0%	3.00	0.03	56.00	25.70	5.00
23	LMPI	2011	PT langgeng makmur industri	0.12	4.00	1.00	25.0%	3.00	0.02	17.78	59.75	4.00
24	LMSH	2011	PT Lionmesh Prima tbk	0.12	3.00	1.00	33.3%	3.00	25.61	18.11	32.22	3.00
25	PRAS	2011	PT Prima Alloy Steel Universal	0.08	3.00	1.00	33.3%	3.00	5.91	45.91	0.91	3.00
26	SMSM	2011	PT Selamat Sempurna tbk	0.22	3.00	1.00	33.3%	3.00	6.03	58.72	24.00	4.00
27	SSTM	2011	PT. Sunson Textile Manufacturer	0.16	6.00	2.00	33.3%	3.00	8.06	53.12	35.72	3.00
28	UNIC	2011	PT. Unggul Indah Cahaya	0.11	6.00	2.00	33.3%	3.00	0.04	65.71	10.11	3.00
29	ETWA	2011	PT. Eterindo Wahanatama tbk.	0.17	4.00	1.00	25.0%	3.00	0.08	7.48	48.15	4.00
30	TCID	2011	PT Mandom Indonesia tbk	0.13	5.00	2.00	40.0%	4.00	0.14	16.13	69.28	4.00

STATISTIK DESKRIPTIF

Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	30	.08	.29	.1593	.06362
DK	30	2.00	11.00	4.5667	2.50080
IDK	30	.25	.50	.3878	.07695
KA	30	3.00	4.00	3.1333	.34575
KM	30	.02	25.61	3.0857	5.37207
KI	30	.11	68.85	29.2513	24.13889
KSA	30	.91	96.32	46.8037	29.77510
RDK	30	2.00	7.00	4.0667	.98027
SIZE	30	8.45	15.18	12.0137	1.16231
Valid N (listwise)	30				

UJI NORMALITAS

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	30
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03903042
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.074
	Negative	-.114
	Kolmogorov-Smirnov Z	.625
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.829

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Linieritas

Means

CSR * DK

ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square
CSR * DK Between Groups (Combined)	.057	6	.010
Linearity	.035	1	.035
Deviation from Linearity	.022	5	.004
Within Groups	.060	23	.003
Total	.117	29	

ANOVA Table

	F	Sig.
CSR * DK Between Groups (Combined)	3.635	.011
Linearity	13.274	.001
Deviation from Linearity	1.707	.173

CSR * IDK

ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square
CSR * IDK Between Groups (Combined)	.057	5	.011
Linearity	.001	1	.001
Deviation from Linearity	.056	4	.014
Within Groups	.061	24	.003
Total	.117	29	

ANOVA Table

	F	Sig.
CSR * IDK Between Groups (Combined)	4.468	.005
Linearity	.222	.642
Deviation from Linearity	2.530	.067

CSR * KA**ANOVA Table^a**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F
CSR * KA Between Groups (Combined)	.002	1	.002	.604
Within Groups	.115	28	.004	
Total	.117	29		

a. With fewer than three groups, linearity measures for CSR * KA cannot be computed.

ANOVA Table^a

	Sig.
CSR * KA Between Groups (Combined)	.444

a. With fewer than three groups, linearity measures for CSR * KA cannot be computed.

CSR * KM**ANOVA Table**

	Sum of Squares	df	Mean Square
CSR * KM Between Groups (Combined)	.072	16	.004
Linearity	.006	1	.006
Deviation from Linearity	.065	15	.004
Within Groups	.046	13	.004
Total	.117	29	

ANOVA Table

	F	Sig.
CSR * KM Between Groups (Combined)	1.273	.334
Linearity	1.820	.200
Deviation from Linearity	1.236	.354

CSR * KI**ANOVA Table**

	Sum of Squares	df	Mean Square
CSR * KI Between Groups (Combined)	.115	25	.005
Linearity	.016	1	.016
Deviation from Linearity	.099	24	.004
Within Groups	.002	4	.000
Total	.117	29	

ANOVA Table

	F	Sig.
CSR * KI Between Groups (Combined)	9.231	.021
Linearity	32.989	.005
Deviation from Linearity	5.241	.059

CSR * KSA**ANOVA Table**

	Sum of Squares	df	Mean Square
CSR * KSA Between Groups (Combined)	.112	23	.005
Linearity	.029	1	.029
Deviation from Linearity	.083	22	.004
Within Groups	.005	6	.001
Total	.117	29	

ANOVA Table

	F	Sig.
CSR * KSA Between Groups (Combined)	5.628	.020
Linearity	33.144	.001
Deviation from Linearity	3.377	.068

CSR * RDK**ANOVA Table**

	Sum of Squares	df	Mean Square
CSR * RDK Between Groups (Combined)	.033	5	.007
Linearity	.003	1	.003
Deviation from Linearity	.030	4	.008
Within Groups	.085	24	.004
Total	.117	29	

ANOVA Table

	F	Sig.
CSR * RDK Between Groups (Combined)	1.853	.141
Linearity	.734	.400
Deviation from Linearity	2.132	.108

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DK	.453	2.208
	IDK	.731	1.368
	KA	.546	1.833
	KM	.720	1.388
	KI	.220	4.536
	KSA	.172	5.802
	RDK	.624	1.602
	SIZE	.717	1.394

a. Dependent Variable: CSR

UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.790 ^a	.624	.480	.04587	2.056

a. Predictors: (Constant), SIZE, IDK, RDK, KI, KM, KA, DK, KSA

b. Dependent Variable: CSR

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.989	3.984		-1.001	.328
DK	.014	.155	.024	.087	.931
IDK	-3.387	3.969	-.181	-.853	.403
KA	-1.745	1.023	-.418	-1.706	.103
KM	-.034	.057	-.126	-.593	.560
KI	.037	.023	.628	1.627	.119
KSA	.040	.021	.834	1.912	.070
RDK	-.290	.337	-.197	-.861	.399
SIZE	.127	.265	.102	.479	.637

a. Dependent Variable: Ln_e2

Analisis Regresi Linier Sederhana

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DK ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSR

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.544 ^a	.296	.271	.05432

a. Predictors: (Constant), DK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.035	1	.035	11.786	.002 ^a
	Residual	.083	28	.003		
	Total	.117	29			

a. Predictors: (Constant), DK

b. Dependent Variable: CSR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.096	.021		4.594	.000
	DK	.014	.004	.544	3.433	.002

a. Dependent Variable: CSR

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	IDK ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSR

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.069 ^a	.005	-.031	.06459

a. Predictors: (Constant), IDK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.001	1	.001	.135	.717 ^a
	Residual	.117	28	.004		
	Total	.117	29			

a. Predictors: (Constant), IDK

b. Dependent Variable: CSR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.137	.062		2.227	.034
	IDK	.057	.156	.069	.367	.717

a. Dependent Variable: CSR

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KA ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSR

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.145 ^a	.021	-.014	.06406

a. Predictors: (Constant), KA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.002	1	.002	.604	.444 ^a
	Residual	.115	28	.004		
	Total	.117	29			

a. Predictors: (Constant), KA

b. Dependent Variable: CSR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.076	.108		.697	.492
	KA	.027	.034	.145	.777	.444

a. Dependent Variable: CSR

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KM ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSR

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.234 ^a	.055	.021	.06296

a. Predictors: (Constant), KM

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.006	1	.006	1.615	.214 ^a
	Residual	.111	28	.004		
	Total	.117	29			

a. Predictors: (Constant), KM

b. Dependent Variable: CSR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.168	.013		12.610	.000
	KM	-.003	.002	-.234	-1.271	.214

a. Dependent Variable: CSR

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KI ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSR

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.375 ^a	.141	.110	.06003

a. Predictors: (Constant), KI

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.016	1	.016	4.578	.041 ^a
	Residual	.101	28	.004		
	Total	.117	29			

a. Predictors: (Constant), KI

b. Dependent Variable: CSR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.188	.017		10.821	.000
	KI	.000	.000	-.375	-2.140	.041

a. Dependent Variable: CSR

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KSA ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSR

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.495 ^a	.245	.218	.05627

a. Predictors: (Constant), KSA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.029	1	.029	9.072	.005 ^a
	Residual	.089	28	.003		
	Total	.117	29			

a. Predictors: (Constant), KSA

b. Dependent Variable: CSR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.110	.019		5.671	.000
	KSA	.001	.000	.495	3.012	.005

a. Dependent Variable: CSR

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	RDK ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSR

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.149 ^a	.022	-.013	.06403

a. Predictors: (Constant), RDK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	1	.003	.632	.433 ^a
	Residual	.115	28	.004		
	Total	.117	29			

a. Predictors: (Constant), RDK

b. Dependent Variable: CSR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.199	.051		3.917	.001
	RDK	-.010	.012	-.149	-.795	.433

a. Dependent Variable: CSR

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SIZE ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSR

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.521 ^a	.271	.245	.05527

a. Predictors: (Constant), SIZE

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.032	1	.032	10.429	.003 ^a
	Residual	.086	28	.003		
	Total	.117	29			

a. Predictors: (Constant), SIZE

b. Dependent Variable: CSR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.183	.107		-1.720	.097
	SIZE	.029	.009	.521	3.229	.003

a. Dependent Variable: CSR

Analisis Regresi Linier Berganda
A. Regresi Linier Berganda Tanpa Variabel Kontrol (Size)

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	RDK, KSA, KM, IDK, KA, DK, KI ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.515	.361	.05087

a. Predictors: (Constant), RDK, KSA, KM, IDK, KA, DK, KI

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.060	7	.009	3.338	.014 ^a
	Residual	.057	22	.003		
	Total	.117	29			

a. Predictors: (Constant), RDK, KSA, KM, IDK, KA, DK, KI

b. Dependent Variable: CSR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.270	.114		2.367	.027
	DK	.015	.005	.607	2.934	.008
	IDK	-.023	.144	-.028	-.159	.875
	KA	-.080	.037	-.433	-2.161	.042
	KM	.000	.002	-.036	-.205	.839
	KI	.000	.001	.090	.284	.779
	KSA	.001	.001	.572	1.600	.124
	RDK	.004	.012	.055	.298	.769

a. Dependent Variable: CSR

B. Analisis Regresi Berganda Dengan Menggunakan Variabel Kontrol (Size)

Regression

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SIZE, IDK, RDK, KI, KM, KA, DK, KSA ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.790 ^a	.624	.480	.04587	2.056

a. Predictors: (Constant), SIZE, IDK, RDK, KI, KM, KA, DK, KSA

b. Dependent Variable: CSR

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.073	8	.009	4.350	.003 ^a
	Residual	.044	21	.002		
	Total	.117	29			

a. Predictors: (Constant), SIZE, IDK, RDK, KI, KM, KA, DK, KSA

b. Dependent Variable: CSR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.075	.130		.578	.569
	DK	.011	.005	.436	2.193	.040
	IDK	-.027	.129	-.033	-.212	.834
	KA	-.086	.033	-.466	-2.574	.018
	KM	.000	.002	-.011	-.071	.944
	KI	.000	.001	.108	.377	.710
	KSA	.001	.001	.579	1.796	.087
	RDK	-.002	.011	-.032	-.191	.851
	SIZE	.021	.009	.389	2.461	.023

a. Dependent Variable: CSR

**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2011**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh:
NUGROHO BUDI WIRAWAN
08412144018**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

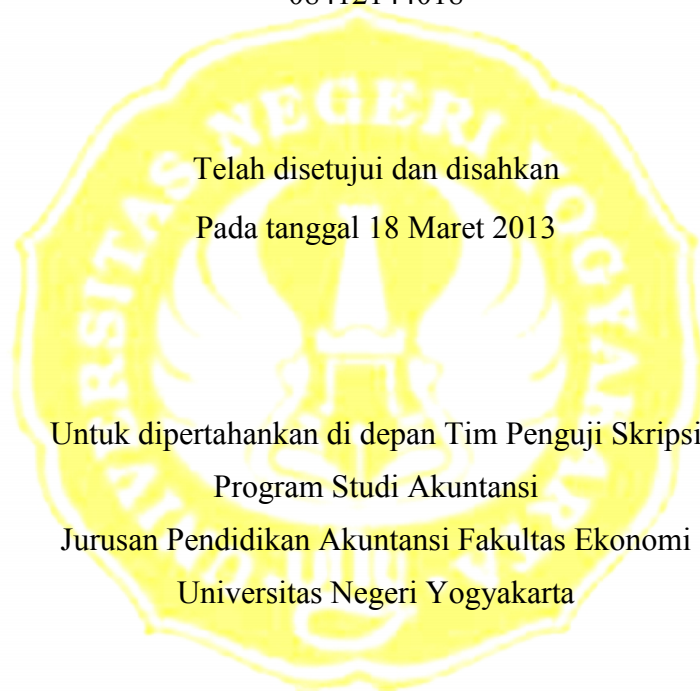
PERSETUJUAN

**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2011**

SKRIPSI

Oleh:

NUGROHO BUDI WIRAWAN
08412144018



Disetujui

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sukirno", is written over a faint rectangular box.

Sukirno, M.Si.,Ph.D

NIP. 19690414 199403 1 002


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011” yang disusun oleh Nugroho Budi Wirawan, NIM. 08412144018 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada 4 April 2013 dan dinyatakan lulus.

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Abdullah Taman, M.Si.,Ak.	Ketua Penguji		15/4 ¹³
Sukirno, M.Si.,Ph.D	Sekretaris Penguji		15/4 ¹³
Drs. Pardiman	Penguji Utama		15/4 ¹³

Yogyakarta, 16 April 2013
Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri, Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 002 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nugroho Budi Wirawan
NIM : 08412144018
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : *PENGARUH KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 Maret 2013

Penulis,



Nugroho Budi Wirawan
NIM. 08412144018

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari urusan sesuatu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. (QS Al-Insyirah : 5-8)

Sukses dalam hidup tidak ditentukan oleh kartu baik, tetapi dengan cara memainkan kartu buruk dengan baik. (Joshua Doll)

Kitalah pahlawan bagi diri kita sendiri (Captain Jack)

PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:
Kedua orang tua penulis, Bapak Suyitno dan Ibu Ely Soelastri
Terima kasih atas doa, nasehat, kasih sayang, perhatian,
pelajaran tentang kehidupan dan materi yang tidak dapat aku hitung lagi..
Kakak dan Adiku, Rizki Ardhi Nugroho dan Taufik Widi Nugroho
Terima kasih atas doa, dorongan dan semangatnya
Sahabatku Wiwit, Dani, Rifki, Inung, Nophan, Rozad, Rochmat,
Ipenk, Ian, Abid, Pungki, Johan, dan Ega
Terima kasih atas semua support yang diberikan selama ini
Special thank's to Keisya Putri Sartika
Terima kasih atas kesetiaan, kasih sayang dan support selama ini
Ijinkan aku menjadi pendamping dan penyempurna imanmu
Semoga Allah mengijinkan kita selalu bersama..*

**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2011**

Oleh:
Nugroho Budi Wirawan
08412144018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian ini merupakan penelitian *ex post facto* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan dari 165 perusahaan manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011. Dengan demikian data yang dianalisis berjumlah 30 perusahaan. Sebelum melakukan teknik analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji linieritas, multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR dengan nilai t hitung sebesar 3,433 dan nilai signifikansi t sebesar 0,002. 2) Independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR dengan t hitung sebesar 0,367 dan signifikansi t sebesar 0,717. 3) Komite Audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR dengan t hitung sebesar 0,777 dan signifikansi t sebesar 0,444. 4) Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR dengan nilai t hitung sebesar -1,271 dan signifikansi t sebesar 0,214. 5) Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR dengan nilai t hitung sebesar -2,140 dan signifikansi t sebesar 0,041. 6) Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR dengan t hitung sebesar 3,012 dan signifikansi t sebesar 0,005. 7) Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR dengan nilai t hitung sebesar -0,795 dan signifikansi t sebesar 0,433. 8) Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Rapat Dewan Komisaris secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR dengan F hitung sebesar 4,350 dan signifikansi F sebesar $0,03 < 0,05$.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Bursa Efek Indonesia.

**THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
CHARACTERISTICS TO THE CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DISCLOSURE IN THE MANUFACTURE
COMPANIES LISTED AT INDONESIA STOCK EXCHANGE
IN 2010-2011**

By:
Nugroho Budi Wirawan
08412144018

Abstract

The objective of the research was to know the effect of the Board of the Commissioners Measurement, the Independence of the Board of Commissioners, Committee Audit, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Foreign Ownership and Meeting of the Board Commissioners through Corporate Social Responsibility Disclosures.

The research was ex-post facto study to the manufacture companies listed in Indonesian Stock Exchange in 2010/2011. The sample of the research used purposive sampling technique. It was 15 companies of 165 manufacture companies listed in Indonesian Stock Exchange in 2010/2011. It could be said that the sample was 30 companies. The normality test, linearity test, multicollinearity test, autokorelasi test and heteroskedastisitas test was used before the simple linear regression and double linear regression method was used in the data analysis.

The results show that 1) the Board of Commissioners Measurement has a positive significant effect on the CSR disclosure which has t count 3.433 and the significance value of t is 0.002. 2) The Independence of the Board of the Commissioners does not have a positive significant effect on CSR disclosure which has t count 0.367 and the significance value of t is 0.717. 3) The Audit Committee does not have a positive significant effect on CSR disclosure which has t count 0.777 and the significance value of t is 0.444. 4) The Managerial Ownership does not have a negative significant effect on CSR disclosure which has t count -1.271 and the significance value of t is 0.214. 5) The Institutional Ownership has a negative significant effect on CSR disclosure which has t count -2.140 and the significance value of t is 0.041. 6) The Foreign Ownership has a positive significant effect on CSR disclosure which has t count 3.012 and the significance value of t is 0.433. 8) Finally, all variables have a significant effect on CSR disclosure which has F count 4.350 and the significance value of F is $0.03 < 0.05$.

Keywords: Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Indonesia Stock Exchange.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karuniaNya serta limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala hambatan dan kendala, namun dengan tekad, motivasi dan semangat yang tinggi serta berbagai pihak, yang berupa bimbingan, petunjuk, dan bantuan, baik secara materiil maupun non materiil. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Sukirno, M.Si., Ph.D. Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi sekaligus dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
4. Dyah Setyorini, M.Si., Ak Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Siswanto M.Pd, Pembimbing Akademik yang telah sabar memberikan arahan, masukkan selama penulis menuntut ilmu.
6. Drs. Pardiman dosen narasumber yang telah sabar memberikan saran dan pengarahan selama penyusunan skripsi.

7. Segenap pengajar Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan penagajaran, ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menimba ilmu.
8. Teman-teman Akuntansi Non Reguler dan Reguler angkatan 2008 yang telah membantu dalam membuat Tugas Akhir Skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah SWT, Amin. Akhirnya harapan peneliti mudah-mudahan apa yang terkandung dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2013

Penulis,



Nugroho Budi Wirawan
NIM. 08412144018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN UNTUK DIUJIKAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DIUJIKAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12

1. <i>Corporate Social Responsibility</i>	12
a. Pengertian dan Konsep CSR.....	12
b. Landasan Teoritis <i>Corporate Social Responsibility</i>	13
c. Pengungkapan CSR di Indonesia.....	17
d. Cara Mengukur CSR.....	22
2. <i>Good Corporate Governance</i>	22
a. Konsep dan Pengertian GCG	22
b. Peranan GCG	27
c. Dewan Komisaris	30
d. Komite Audit	34
e. Perkembangan GCG di Indonesia.....	37
3. Kepemilikan Manajerial	40
4. Kepemilikan Institusional	42
5. Kepemilikan Asing	43
6. Ukuran Perusahaan	44
B. Penelitian yang Relevan	44
C. Kerangka Berpikir	47
D. Paradigma Penelitian	52
E. Hipotesis Penelitian	53
BAB III. METODE PENELITIAN	55
A. Tempat dan Waktu Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	55
C. Definisi Operasional	55

1. Variabel Dependen	56
2. Variabel Independen	57
3. Variabel Kontrol	59
D. Populasi dan Sampel Penelitian	60
E. Metode Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisis Data	61
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Data Penelitian	78
B. Analisis Deskriptif	78
C. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.....	81
D. Pengujian Hipotesis Penelitian	86
E. Pembahasan Hasil Penelitian	100
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114
Daftar Lampiran	117

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penentuan Sampel	61
2. Hasil Seleksi Sampel	78
3. Deskriptive Variabel Penelitian	79
4. Hasil Uji Normalitas	82
5. Rangkuman Hasil Uji Linieritas	83
6. Uji Multikolonieritas	84
7. Statistik Durbin Watson	85
8. Uji Heteroskedastisitas.....	86
9. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana	87
10. Hasil Regresi Linier Berganda tanpa menggunakan <i>Size</i>	94
11. Hasil Regresi Linier Berganda dengan menggunakan <i>Size</i>	96
12. Sumbangan Efektif dan Relatif	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Board of Director dalam <i>One Tier System</i>	30
2. Struktur BoD dan BoC dalam <i>Two Tiers System</i>	31
3. Paradigma Penelitian	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Sampel Penelitian	118
2. <i>GRI Sustainability Reporting GuideLinesG3</i>	119
3. Data Penelitian	125
4. Statistik Deskriptif	126
5. Uji Normalitas.....	127
6. Uji Linieritas	128
7. Uji Multikolonieritas, Uji Autokorelasi	132
8. Uji Heteroskedastisitas.....	133
9. Analisis Regresi Linier Sederhana.....	134
10. Analisis Regresi Linier Berganda	142